

# Sejarah Sosial Orang Melayu, Keturunan Arab Dan Cina di Palembang

Dari Masa Kesultanan Palembang  
Hingga Reformasi

Jumhari

Direktorat  
Budayaan

6

BPSNT Padang  
Press



959.816  
JUM  
S

Sejarah Sosial Orang  
Melayu, Keturuan Arab  
dan Cina di Palembang:  
Dari Masa Kesultanan  
Palembang Hingga Reformasi

Sejarah Sosial Orang  
Melayu, Keturuan Arab  
dan Cina di Palembang:  
Dari Masa Kesultanan  
Palembang Hingga Reformasi

Jumhari



BPNST PadangPress 2010  
Jumhari

---

Sejarah Sosial Orang Melayu, Keturunan Arab dan  
Cina di Palembang:  
Dari Masa Kesultanan Palembang Hingga Reformasi  
©2010 BPNST PadangPress  
Cetakan Pertama: Oktober 2010

---

Hak Penerbitan pada BPNST PadangPress  
*Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang  
mengutip atau memperbayak sebagian atau seluruh isi  
buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit (UU No. 19  
Tahun 2002 tentang Hak Cipta)*

---

**Editor**

Dr. M. Nur

**Desain cover**

R.L. Arios

**Lay-out**

CV. FAURA ABADI

**Percetakan**

CV. FAURA ABADI

**I S B N**

978-602-8742-20-7

**Foto Cover:** *Sungai Musi* (sumber: R.L. Arios)

---

Penerbit:

BPNST PadangPress

Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji Padang

Sumatra Barat

Telp/faks: 0751-496181 [www.bpsnt-padang.info](http://www.bpsnt-padang.info)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, laporan penelitian ini dapat dislesaikan dengan baik. Penelitian tentang “Sejarah Sosial Orang Melayu, Keturunan Arab dan Cina di Palembang, Dari Masa Kesultanan Palembang sampai Reformasi merupakan upaya rekontruksi sejarah sosial ekonomi, politik dan budaya terhadap permasalahan relasi antara kelompok pribumi dengan masyarakat keturunan Arab dan Cina di Palembang yang telah berinteraksi dan berakulturasi didalam membentuk jperadaban Palembang selama berabad-abad lamanya yang terlihat jeak peninggalannya sampai saat ini.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nurmatias, selaku Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan pengumpulan data hingga selesainya laporan penelitian ini terutama kepada para narasumber seperti, Bapak Hambali Hasan, Bapak Johan Hanafiah, Tokoh masyarakat Arab dan Cina di Palembang, serta rekan-rekan sejawat yang telah banyak memberikan dukungan moril.

Akhir kata *tak ada gading yang tak retak*, penulis mohon kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini dimasa yang akan datang. Semoga hasil laporan penelitian memberi manfaat kepada kita semua.

Padang, Oktober 2010

Penulis

**SAMBUTAN DIREKTUR TRADISI  
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM  
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Diiringi puji dan syukur, saya menyambut gembira atas terbitnya buku tentang ***Sejarah Sosial Melayu, Arab dan Cina***, buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh staf fungsional Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang yang kemudian disempurnakan kembali oleh penulisnya sehingga hadir ditangan pembaca dalam bentuk buku.

Kejayaan Palembang sempat meredup dalam panggung politik dan percaturan perdagangan global di kawasan sekitar perairan malaka. Kemundurannya tidak terlepas dari munculnya kekuatan politik baru-Kerajaan Majapahit yang melebarkan pengaruhnya di seantero Nusantara, termasuk Palembang. Seiring dengan penyebaran Islam di wilayah Nusantara, Palembang secara perlahan-lahan kembali tampil ke permukaan, yang ditandai dengan munculnya Kesultanan Palembang yang mencapai kejayaannya pada abad ke-17 dan 18.

Pada masa ini Palembang menjadi salah satu poros penting perdagangan yang menghubungkan jalur perdagangan di sekitar perairan malaka dengan Pantai Utara Jawa. Palembang tidak hanya sebagai Bandar yang sibuk dengan perdagangan, akan tetapi Palembang merupakan kawasan yang paling dinamis dalam perkembangan intelektual Islam Melayu bersama Aceh, Banten dan Banjarmasin.

Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat menambah pengetahuan, menambah cakrawala berfikir pembaca dalam memahami sejarah sosial etnik di Palembang.

Jakarta, 13 Oktober 2010  
Direktur Tradisi



Dra. Poppy Savitri  
NIP. 19591115 198703 2 001

## DAFTAR ISI

|                                                                                            | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR.....                                                                        | iii     |
| KATA SAMBUTAN.....                                                                         | v       |
| DAFTAR ISI.....                                                                            | vii     |
| DAFTAR TABEL.....                                                                          | ix      |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                         | xi      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                             | 1       |
| A. Latar Belakang .....                                                                    | 1       |
| B. Pembatasan dan Rumusan Masalah .....                                                    | 12      |
| C. Tujuan dan Manfaat .....                                                                | 13      |
| D. Kerangka Konseptual .....                                                               | 14      |
| E. Tinjauan Pustaka .....                                                                  | 16      |
| F. Metode Penelitian .....                                                                 | 19      |
| G. Sistematika Penulisan .....                                                             | 20      |
| <br><b>BAB II PALEMBANG SELAYANG PANDANG</b> .....                                         | <br>22  |
| A. Topografi, Geografi dan Demografi Daerah Palembang .....                                | 22      |
| B. Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Budaya....                                                | 29      |
| C. Pola Pemukiman .....                                                                    | 35      |
| <br><b>BAB III RELASI ORANG MELAYU DENGAN ORANG CINA DAN ORANG ARAB DI PALEMBANG</b> ..... | <br>42  |
| A. Masa Kesultanan Palembang .....                                                         | 42      |
| B. Masa Kolonial Belanda .....                                                             | 48      |
| C. Masa Pendudukan Singkat Jepang .....                                                    | 48      |
| D. Masa Kemerdekaan .....                                                                  | 54      |
| E. Masa Orde Lama Sampai Reformasi .....                                                   | 77      |

|                              |                                                                                                                                             |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV</b>                | <b>ARSITEKTUR BANGUNAN ( BANGUNAN<br/>INDIS) DAN MOTIF KAIN SONGKET<br/>TRADISIONAL PALEMBANG SEBAGAI<br/>BENTUK AKULTURASI BUDAYA.....</b> | <b>78</b> |
|                              | A. Arsitektur Bangunan Kolonial .....                                                                                                       | 78        |
|                              | B. Motif Kain Songket .....                                                                                                                 | 85        |
| <b>BAB V</b>                 | <b>PENUTUP .....</b>                                                                                                                        | <b>88</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  |                                                                                                                                             | <b>90</b> |
| <b>DAFTAR INFORMAN</b> ..... |                                                                                                                                             | <b>93</b> |

## DAFTAR TABEL

| Tabel :                                                      | Hal |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Penduduk berdasarkan etnik di Palembang<br>1930.....      | 27  |
| 2. Penduduk Kecamatan Palembang 1961,<br>1971, dan 1981..... | 28  |
| 3. Luas Wilayah Kota Palembang Tahun<br>2002.....            | 29  |
| 4. Hasil Hutan Palembang Tahun<br>1916-1917.....             | 32  |



## DAFTAR GAMBAR

| Gambar :                                                | Hal |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 1. Peta alur sungai di Palembang tahun 1819.....        | 23  |
| 2. Sungai Musi dan Kehidupan Masyarakat Palembang ..... | 26  |
| 3. Sungai Musi dan Pasar 16 Ilir Palembang.             | 31  |
| 4. Rumah Rakit di Sungai Musi, dulu dan sekarang .....  | 36  |
| 5. Rumah kapiten Cina-Palembang di Kampung 7 Ulu.....   | 38  |
| 6. Pola Pemukiman di Sungai Musi .....                  | 41  |
| 7. Struktur Wilayah Kesultanan Palembang..              | 45  |
| 8. Perahu Jung (Wangkang) Cina .....                    | 47  |
| 9. Benteng Kuto Besak .....                             | 80  |
| 10. Mesjid Agung Palembang .....                        | 82  |
| 11. Kantor Walikota Palembang .....                     | 83  |
| 12. Hotel Musi .....                                    | 84  |
| 13. Motif Nago Besaung .....                            | 85  |
| 14. Motif Bungo Cino .....                              | 87  |
| 15. Motif Bungo Cino.....                               | 87  |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Momentum puncak perayaan Tahun Baru Cina (imlek) 2559 secara nasional yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), yang dihadiri oleh presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yoedhoyono menjadi kado terindah bagi saudara kita dari etnis Cina. Dalam perhelatan istimewa ini presiden meminta serta mengingatkan kembali kepada aparat pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sama dan adil bagi masyarakat Cina.<sup>1</sup> Pernyataan tersebut sejatinya bisa dimaklumi dalam kerangka sikap dan tindakan pemerintahan kabinet Indonesia bersatu untuk konsisten dengan pelaksanaan UU no.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia yang didalamnya mengamanahkan persamaan dan kesetaraan semua Warga Negara Indonesia, termasuk didalamnya etnik Cina dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan undang undang tersebut, maka secara otomatis etnis Cina tidak perlu lagi bersusah payah mengurus SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) yang selama ini menjadi beban moral dan lilitan sejarah yang tak pernah kunjung lepas disepanjang sejarah berdirinya republik ini.<sup>2</sup>

Pesan moral pemerintah tersebut diatas seolah mengajak kepada kita semua untuk tetap komit membangun kebersamaan sebagai sebuah bangsa menuju visi Indonesia 2030 yang sejahtera, beradab dan berkeadilan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Dalam perspektif yang

---

<sup>1</sup> Padang Ekspres, tanggal 18 Februari 2008.

<sup>2</sup> Ibid.,

lebih luas, pesan sederhana presiden tersebut, bisa dibaca berbeda, artinya persoalan krisis ekonomi bangsa ini, tidak akan pernah beranjak dari fase stagnan kearah perbaikan (*recovery*) manakala problem sosial budaya yang menjadi salah satu penghambat gerak perubahan sosial masyarakat masih melekat didalamnya dan tidak pernah ditangani secara serius oleh kita semua selama ini.

Reformasi yang terjadi tahun 1998 yang semula dianggap sebagai titik pijak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, ternyata hanya sebatas retorika belaka. Harapan dan *euphoria* yang berlebihan dari berbagai komponen masyarakat tidak dengan sendirinya *parallel* dengan realitas sosial dalam kehidupan nyata. Reformasi ibarat keping mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Sisi pertama melahirkan suasana kehidupan bermasyarakat yang lebih demokratis dan penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM), disisi lain memunculkan coretan buram yakni semangat "etno-sentrisisme" yang dibungkus atas nama otonomi daerah. Realitas empirik menunjukkan konflik dengan nuansa etnik silih berganti dari ujung timur Papua, Ambon, Poso hingga di Kalimantan Barat.<sup>3</sup>

Fenomena terbaru menunjukkan negeri Jiran Malaysia yang selama ini menjadi salah satu model keberhasilan pembangunan negara berkembang ternyata tidak lepas dari persoalan internal menyangkut disharmoni antaretnis, yakni antara orang Melayu dan etnik keturunan India terkait dengan kesenjangan sosial ekonomi diantara mereka. Persoalan yang sama tetapi dengan frekuensi lebih yang banyak

---

<sup>3</sup> Pembahasan menarik untuk tema bisa dibaca misalnya, *Konflik Komunal Dan Ketersingkirkan Sosial*, Kumpulan Makalah Diskusi Sejarah Lokal, Depdiknas, Jakarta, 2001. Untuk kajian yang lebih khusus bisa dibaca karya Bambang Hendrata Suta Purwana, *Konflik Antar Komunitas Etnis Di Sambas 1999, Suatu Tinjauan Sosial Budaya*, Pontianak : Romeo Grafika, 1999.

menimbulkan konflik, yakni antara mayoritas pribumi dengan masyarakat keturunan Cina di Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam konteks hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas asing (keturunan Arab dan Cina) di Nusantara, menarik diperbincangkan mengingat relasi diantara masing masing kelompok ini mengalami pasang surut di sepanjang arus sejarah pembentukan peradaban masyarakat Indonesia modern. Jauh sebelum lahirnya wacana *multikulturalisme* pada hari ini, kehidupan majemuk bukanlah pengalaman baru bagi bangsa Indonesia. Sejarah telah memberikan bukti bagaimana wilayah Nusantara pada masa lampau pernah menjadi pusat pertemuan peradaban besar dunia, seperti India, Cina, Arab, Eropa, Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan wilayah lainnya, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa Indonesianis seperti Lombard dan Anthony Reid.<sup>5</sup>

Dalam spektrum sejarah lokal, Palembang setidaknya tercatat sebagai salah satu tempat di Nusantara bagi bertemunya beberapa peradaban besar dunia dalam perspektif sejarah berdirinya sebuah kota dalam pengertian sosial politik, ekonomi maupun budaya. Palembang selain menjadi tempat tinggal komunitas Melayu Palembang (lokal), juga menjadi tempat bagi bermukimnya etnik lainnya seperti keturunan Arab dan Cina. Kemajemukan kota Palembang telah terbentuk jauh sebelum Palembang menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Pada masa lampau Palembang menjadi bandar terpenting bagi perdagangan dan pelayaran Indonesia bagian barat yang

---

<sup>4</sup> Leo Suryadinata, "Aksi anti Cina di Asia Tenggara, Upaya Mencari Penyebab dan Pemecahan" dalam *Konflik Kekerasan Internal, Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik*, Jakarta : Yayasan Obor, 2005, hal. 173-185.

<sup>5</sup> Lihat *magnus opumnya* Denis Lombard, Nusa Jawa : Silang Budaya Jilid I-III, Jakarta : Gramedia, 2000, baca juga karya Anthony Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I: Tanah Dibawah Angin Dan Jilid II* : dari Ekspansi Hingga Krisis, Jakarta : YOI, 1993 & 1999.

menghubungkan dua kawasan penting perdagangan Asia, yakni Cina, India dan Arab. Bahkan Palembang merupakan salah satu bandar terpenting bagi terbentuknya komunitas yang berciri kosmopolitan, yakni pada periode kerajaan maritim Sriwijaya maupun pada masa Kesultanan Islam Palembang Darussalam.<sup>6</sup>

Hubungan antar Nusantara dengan Timur Tengah dan Timur Jauh melibatkan sejarah yang panjang, hubungan ini terjalin sebagai bagian dari rantai perdagangan global pada zamannya. Setidaknya kapal-kapal Arab dan Persia yang berdagang ke Cina melakukan pengembaraan pula di Nusantara jauh sebelum kedatangan Islam di Nusantara.<sup>7</sup>

Gambaran mengenai kota Palembang menjadi kisah yang penuh romantisme sekali berbau mitos, setidaknya itu menurut catatan para pengembara dari Arab dan Persia yang sempat menyinggahi wilayah ini mereka melukiskan sungai musi dimana kota Palembang berada, adalah bagaikan kota di tepian Sungai Tigris. Kota Palembang digambarkan sebagai kota yang megah, dimana jika dimasuki kota, kokok ayam jantan tidak berhenti bersahut sahutan, sekilas mirip dongeng 1001 malam yang termashur itu. Akan tetapi pelaut pelaut Cina lebih realistis mencatat mengenai kota ini, dimana mereka melihat kehidupan penduduk kota yang hidup diatas rakit-rakit tanpa dipungut pajak. Sedangkan bagi pemimpinnya tinggal ditanah kering di rumah yang bertiang.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta : LP3ES, 2003, hal 4.

<sup>7</sup> zyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Akar Pembaharuan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004, hal.19. lihat pula Friedrich Hirth and WW Rockhill, *Chau Jua Kua on the Chinese and Arab Trade in Twelfth and Thirteenth Centuries*, Amsterdam : Oriental Press, 1966.

<sup>8</sup> Dikutip dari <http://dodinp.multiply.com/journal/item/54>.

Bahkan dalam beberapa sumber Kerajaan Arab Palembang disebut sebagai Mamlakat Al-Maharaja ("Kerajaan Raja di Raja") atau dalam sumber Cina disebut *Shih-Li-Foshih* atau *San-Fo-Chi*, Sriwijaya mulai terlihat pamornya pada abad ke-7 yang wilayahnya membentang luas dari Sumatera, semenanjung Malaya dan Jawa selama lima abad kemudian. Pada periode ini Palembang berperan sebagai pelabuhan *entreport* terpenting di kawasan Asia Tenggara.

Kejayaan Palembang sempat meredup dalam panggung politik dan percaturan perdagangan global di kawasan sekitar perairan malaka. Kemundurannya tidak terlepas dari munculnya kekuatan politik baru-Kerajaan Majapahit yang melebarkan pengaruhnya di seantero Nusantara, termasuk Palembang<sup>9</sup>. Seiring dengan penyebaran Islam di wilayah Nusantara, Palembang secara perlahan lahan kembali tampil ke permukaan, yang ditandai dengan munculnya Kesultanan Palembang yang mencapai kejayaanya pada abad ke-17 dan 18.

Pada masa ini Palembang menjadi salah satu poros penting perdagangan yang menghubungkan jalur perdagangan di sekitar perairan Malaka dengan pantai utara Jawa. Palembang tidak hanya sebagai bandar yang sibuk dengan perdagangan, akan tetapi Palembang merupakan kawasan yang paling dinamis dalam perkembangan intelektual Islam Melayu bersama Aceh, Banten dan Banjarmasin.<sup>10</sup>

Jika Aceh melahirkan ulama-ulama sekaliber Abdurahman al-Sinkil, Hamzah Fansuri serta Nurrudin ar Raniri, Banten memunculkan ulama kondang Syeik Yusuf al-

---

<sup>9</sup> Jumhari dkk., *Arab Palembang dari Masa Kesultanan sampai Kolonial Belanda*, Suatu Kajian Sejarah, Padang: BKSNT, 2006, hal 3. Mengenai masuknya Islam lihat K.H.O Gadjahnata, Sri Edi Swasono (ed), *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, Jakarta : UI Press, 1986.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal.4

Maqasari, Banjar dengan Muhammad Arsyad al-Banjari, maka Palembang mentasbikan beberapa ulama dengan reputasi internasional seperti Syekh Abdul Shamad al-Palimbani. Dari beberapa keterangan menyangkut identitas dan riwayat karir keilmuwan Syekh Abdul Shamad al-Palimbani, ia merupakan salah seorang ulama keturunan arab yang memiliki pengaruh luas tidak hanya di lingkungan keraton Palembang, bahkan sampai ke dunia Melayu.

Dalam lapangan ekonomi, menurut catatan Sevenhoven pada awal pemerintahan Belanda di Palembang, orang Arab berjumlah sekitar 500 orang yang kebanyakan tinggal mengelompok dalam suatu kampung. Mereka adalah pedagang kain linen terbesar, malah ada diantara mereka yang mempunyai kapal dan perahu sendiri, akan tetapi kebanyakan mereka adalah pedagang perantara. Perkampungan Arab ini dikepalai oleh salah seorang dari mereka yang biasanya diberi gelar pangeran seperti Pangeran Umar, Pangeran Abdul Rahman bin Hasan al-Habsyi.<sup>11</sup>

Pada masa ini Kesultanan Palembang posisi orang Cina sebagai pedagang perantara berada dibawah kolega mereka (orang Arab). Orang orang Cina pada masa ini memperdagangkan barang barang seperti barang pecah-belah, sutera kasar, benang emas, panci panci besi, obat obatan, teh, manisan dan barang barang Cina lainnya. Orang orang pribumi biasanya memperdagangkan hasil-hasil pertanian dan hutan seperti rotan, damar, lilin dan sebagainya. Dalam berdagang biasanya mereka menggunakan perahu yang disebut *wangkang*, yang mirip dengan kapal atau *jung* Cina hanya ukurannya lebih kecil.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> J.L van Sevenhoven, *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, diterjemahkan oleh Sugarda Purbakawatja, Jakarta: Bhratara, 1971, hal. 33-34.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 47.

Ada semacam perlakuan berbeda yang dilakukan pihak Kesultanan Palembang terhadap orang-orang Cina pada masa ini. Orang-orang Cina tidak diperbolehkan memiliki lahan pertanian, mereka diperkenankan tinggal di kota Palembang. Akan tetapi, mereka harus tinggal di atas perahu yang disebut rumah rakit di Sungai Musi. Kebijakan ini diambil oleh sultan dengan maksud untuk melindungi kepentingan kerajaan serta memudahkan pihak kesultanan untuk mengendalikan orang-orang Cina, yakni dengan cara membakar rumah rakit mereka kalau dipandang keberadaan orang Cina membahayakan.<sup>13</sup>

Sedangkan terhadap orang Arab, pihak Kerajaan Palembang memperbolehkan pedagang Arab membangun gudang mereka di darat. Bahkan di lingkungan keraton, orang Arab yang umumnya datang dari Hadramaut mempunyai kedudukan khusus. Orang Belanda yang pernah mengunjungi keraton Palembang menyaksikan, bahwa jika pembesar kerajaan menghadap raja, mereka harus menyembah sampai menyentuh lantai, sedangkan orang Arab boleh di kursi di sisi sultan. Dalam segi hukum orang Arab juga hampir kebal.<sup>14</sup>

Pada masa kolonial Belanda terjadi perubahan yang cukup dramatis, yakni sejak dimulainya penerapan kebijakan politik segregasi rasial yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan kolonial. Masyarakat Hindia Belanda dikelompokkan berdasarkan stratifikasi sosial yang timpang, kelompok warga kelas satu ditempati oleh orang-orang Eropa, kelompok kedua orang Timur Asing seperti Cina, Arab dan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 21.

<sup>14</sup> Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo, Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, Jakarta : INIS, 1997, hal. 15



bangsa Asia lainnya. Sedangkan mayoritas kelompok pribumi berada dalam strata sosial paling bawah.<sup>15</sup>

Kondisi ini semakin kokoh dengan adanya pengelompokan hunian (pemukiman) berdasarkan kelompok etnik tertentu. Maka di kota-kota besar di Indonesia pada masa kolonial seperti Batavia, Semarang termasuk pula Palembang dijumpai kampung-kampung kategori tersebut, seperti kampung Cina, kampung Arab, kampung Jawa, kampung Bugis dan kampung etnik lainnya, yang mencerminkan pemisahan secara fisik.<sup>16</sup>

Klasifikasi sosial disertai terbentuknya hunian (pemukiman) berdasarkan etnik diperkuat pula dengan kebijakan ekonomi kolonial, dimana kelompok Timur Asing dilarang menjalankan usaha pertanian serta memiliki tanah, sementara disisi lain mereka diberikan keleluasaan peran sebagai mediator (pedagang perantara) yang menjembatani kepentingan pribumi dengan pemerintah kolonial<sup>17</sup>, peran istimewa yang diperoleh kelompok Cina dibanding kolega mereka (orang Arab) pada masa ini dalam lapangan perdagangan terlepas dari faktor politik maupun agama.

Palembang pada awal abad ke-20 dalam perspektif kepentingan ekonomi kolonial dilihat sebagai salah satu kawasan daerah-untung (*wingesten*). Hal ini disebabkan Palembang pada masa ini mengalami *booming* ekonomi, yang di tandai dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara pesat. Sebagai indikatornya

<sup>15</sup> Mona Lohanda, *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 2001. Keterangan lainnya bias dilihat dalam buku Leo Suryadinata, *Dilemma Minoritas Tionghoa*, Jakarta : Graffiti Press, 1995. Juga karya W.F.Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999, hal 106-107

<sup>16</sup> Mona Lohanda, *op.cit.* hal 1-35.

<sup>17</sup> Liem Twan Djie, *Perdagangan Perantara Distribusi Orang Cina di Jawa, Suatu Studi Ekonomi*, Jakarta : PT gramedia pustaka utama, 1995

yakni mulai terbukanya Palembang sebagai kawasan eksploitasi perkebunan (tembakau, kopi dan karet) serta mulai dilakukannya eksplorasi di bidang pertambangan (minyak bumi dan batu bara).<sup>18</sup> Selanjutnya pada permulaan abad ke-20 pula di Palembang, tumbuh dan berkembang jaringan kepiilangan (permakelaran) berdasarkan aliansi etnik dan jenis komoditas perdagangan. Jaringan kepiilangan merupakan bagian dari mata rantai perdagangan secara lokal, nasional maupun regional.

Permulaan abad ke 20 juga dipandang sebagai masa tumbuhnya profesi kepiilang berdasarkan ikatan etnis. Kemunculan kelompok pedagang pengusaha Barat yang beroperasi di Palembang seperti *Borsumij* (eksportir karet), *Eccompto* (importir barang barang mewah), *NHM* (perbankan) dan *Hogemijer* (produsen makanan dan minuman). Sedangkan kelompok pedagang pengusaha Cina di Palembang bergerak di bidang usaha transportasi penguasaan komoditas karet, seperti *Tiong Hoa Sing Loen Choen Kongsj* (transportasi) dan *NV Palembang Rubber* (karet). Akan halnya perdagangan pribumi ada beberapa pedagang pengusaha yang cukup sukses seperti H.M. Akil dengan firma Haji Akil dan H. Anang dengan firmanya H. Anang. Selain kedua tokoh diatas masih ada beberapa pribumi yang uckup menonjol baik secara perorangan maupun dalam bentuk firma. Pengusaha pribumi antara lain: H. Asya'ri seorang pedagang sekaligus pemborong bangunan, Haji Ali pedagang karet di seberang I Ulu dan Haji Jamaludin dengan perusahaannya firma Toko Bali.

Kemudian pertumbuhan ekonomi Palembang sempat mengalami perlambatan sebagai dampak peristiwa *malaise* dunia pada tahun 1930-an. Masa ini ditandai dengna ambruknya kinerja perusahaan perusahaan milik kaum kapital yang banyak bergantung dari struktur kekuasaan kolonial.

---

<sup>18</sup> Mestika Zed, *op.cit*, hal 5

Masa singkat pendudukan bala tentara *Dai Nippon* sering kali dikatakan sebagai orde penuh ketidak pastian. Akan tetapi pada saat bersamaan dipandang pula sebagai tumbuhnya bibit nasionalisme. Masyarakat awam acap kali menilai bahwa periode 3,5 tahun penjajahan Jepang menimbulkan kesengsaraan yang lebih besar ketimbang penjajahan Belanda. Masa pendudukan Jepang sampai periode revolusi dalam perspektif Twang Peck Yang<sup>19</sup>. Merupakan periode keemasan aktivitas perdagangan gelap yang menghubungkan poros perdagangan Palembang-Singapura. Dua tipe perdagangan yakni *danbang* dan *lianho*, merupakan pola dagang yang terlibat dalam kegiatan perdagangan gelap ini, yang satu lebih bercorak perseorangan yang lainnya lebih merupakan usaha perkongsian. Kemitraan antara kelompok bisnis Cina dengan kelompok Republik semata mata dilakukan dengan kepentingan yang berbeda. Bagi pihak republik perdagangan gelap dilakukan dengan kepentingan yang berbeda. Bagi pihak republik perdagangan gelap dilakukan untuk mendukung operasional kepentingan republik untuk mempertahankan kemerdekaan, sedangkan bagi kelompok bisnis Cina ditujukan untuk kepentingan ekonomi mereka.<sup>20</sup>

Setelah Indonesia merdeka perubahan kebijakan penguasa (pemerintah RI) masih tidak beranjak dari bayang bayang politik diskriminasi rasial warisan kolonial, terbukti dengan kebijakan pemerintahan Orde Lama dengan UU kewanganegaraan tahun 1946 sampai keluarnya PP no. 10

---

<sup>19</sup> Twan Peck Yang, *Elit Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*, diterjemahkan oleh Apri Danarto, Yogyakarta: Penerbit Niagara, 2005.

<sup>20</sup> Jumhari dkk, *Jaringan Perdagangan Perantara Etnik Cina di Palembang Dari Permulaan Abad Ke 20 Sampai Akhir Kolonial*, Padang : BPSNT, 2007, hal. 73-74

tahun 1959<sup>21</sup> yang membatasi aktifitas perdagangan etnik Cina di daerah pedesaan serta berbagai kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan Bumi Putera (politik ekonomi benteng) yang dengan maksud mengendalikan gurita ekonomi kelompok ini. Alih alih mengendalikan mereka, justru kelompok inilah yang memanfaatkan rekan pribumi mereka.

Kebijakan ini tetap dilanjtkan pada era Orde Baru, justru dengan slogan “pembangunanisme” kritik terhadap ketimpangan pembangunan mendapat tekanan yang lebih represif dari pemerintah. Sehingga lahirlah apa yang disebut kelompok “cukongisme” yang tidak lain merupakan metaforis dari para *tauke-tauke* keturunan Cina. Kiranya perubahan mengenai perlakuan terhadap kelompok etnis Cina mula terlihat signifikan sejak pemerintahan Abdurahman Wahid, yang memperkenankan berbagai symbol-simbol dan atribut budaya milik masyarakat keturunan Cina dilakukan secara terbuka, hal berbeda ketika Soeharto melakukan tindakan pelarangan pada masa awal pemerintahannya.

Pasang surut hubungan antara penguasa pribumi (Melayu) dengan etnik keturunan Cina dan Arab di Palembang tidak terlepas dari konstelasi politik dan ekonomi serta jiwa zaman yang terus berubah. Hubungan diantara mereka tidak selalu berjalan harmonis bahkan diwarnai dengan perseteruan, misalnya kekerasan sosial terhadap etnik Cina pada masa revolusi fisik dengan berbagai atribut kekerasan “Cak Lau”<sup>22</sup>. Serta kondisi mutakhir terjadinya disharmonisasi yang mengarah pada terciptanya konflik sosial, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, seperti pada kasus penolakan masyarakat keturunan Arab di kampung 13 Ulu

---

<sup>21</sup> Leo Suryadinata, *Dilemma Minoritas Tionghoa*, Jakarta : Graffiti press, 1984.

<sup>22</sup> Jumhari, *Rakit yang Berubah Haluan: Perubahan Sikap Politik dan Orientasi Ekonomi Orang Cina di Palembang Pada Masa Revolusi, Suatu Kajian Sejarah Sosial*, Padang: BPSNT, 2008.

yang menolak relokasi kampung mereka, terkait dengan rencana pembangunan jembatan Musi II oleh Pemko Palembang.<sup>23</sup>

Bertitik tolak dari uraian diatas maka penulis mengambil judul **“Sejarah Sosial Orang Melayu, Keturunan Arab dan Cina di Palembang, Dari Masa Kesultanan Palembang sampai Reformasi”**. Kajian ini merupakan upaya penulis untuk memberikan gambaran awal menyangkut realitas sosial politik dan ekonomi masyarakat Melayu, keturunan Cina dan Arab di Palembang dari Masa Kesultanan sampai Reformasi. Selain itu, penulisan sejarah lokal dengan tema diatas perlu dilakukan, ditengah minimnya literatur yang mengangkat persoalan minoritas Cina di Palembang dalam konteks historiografi lokal maupun nasional.

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini mengambil batasan spatial, kota Palembang dan kawasan sekitarnya. sedangkan batasan temporal dari tahun berdirinya Kesultanan Palembang sekitar abad ke 17 sampai reformasi (1998). Berdirinya Kesultanan Palembang dipandang sebagai titik awal bagi lahirnya embrio awal benih benih munculnya diskriminasi sosial secara tersamar. Sedangkan batasan akhir permasalahan yakni masa reformasi sebagai titik balik perubahan tatanan kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia maupun di daerah Palembang sendiri. Akan tetapi batasan temporal tidaklah bersifat kaku, karena fakta dan peristiwa sejarah bagaimanapun merupakan suatu hal yang sifatnya berkesinambungan. Ada beberapa permasalahan yang cukup aktual untuk dibahas dalam kajian ini , antara lain :

---

<sup>23</sup> Kompas, 21 November 2005.

- a. Bagaimana relasi antara orang pribumi (Melayu) dengan etnik keturunan Cina dan Arab dari masa Kesultanan sampai Reformasi ? Dan sejauh mana kebijakan pemerintah (penguasa) berpengaruh terhadap perubahan sikap politik dan orientasi ekonomi etnik Cina dan Arab di Palembang pada masa ini ?
- b. Bagaimana relasi antara orang pribumi (Melayu) dengan etnik keturunan Cina dan Arab dalam konteks budaya lokal, seperti munculnya arsitektur bangunan (*Indis*) dan motif kain Songket Tradisional khas Palembang sebagai wujud akulturasi kebudayaan.

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan sejauh mana masa Kesultanan Palembang sampai reformasi memiliki pengaruh penting terhadap munculnya harmonisasi dan disharmonisasi antar etnik di Palembang serta mengulas hubungan antara kebijakan penguasa, secara langsung terhadap kehidupan politik dan ekonomi orang Cina dan Arab di Palembang. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini setidaknya memberi gambaran awal mengenai relasi dalam kehidupan social politik dan ekonomi orang Melayu, Cina dan Arab di Palembang pada periode ini dalam perspektif lokal.

Dari hasil penelitian mengenai "Sejarah Sosial Orang Melayu, Keturunan Arab dan Cina di Palembang dari masa Kesultanan Palembang sampai Reformasi", diharapkan akan tersusun sebuah laporan penelitian dengan tema seperti tersebut diatas.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada para *stakeholder*, masyarakat pemerhati sejarah dan budaya serta instansi terkait yang memiliki perhatian dan peduli pada sejarah dan budaya lokal. Dari hasil penelitian ini, pada gilirannya akan menghasilkan berbagai temuan dan munculnya gagasan atau ide baru mengenai persoalan kebijakan pemerintah dan manajemen pengelolaannya terkait dengan persoalan hubungan antara masyarakat lokal dengan warga keturunan Arab dan Cina di Palembang, yang bisa dirumuskan melalui kegiatan berupa seminar atau diskusi, seperti :

- a. Kebijakan politik dan pengelolaan masyarakat Palembang yang majemuk, perspektif kelampauan dan prospek kedepannya.
- b. Refleksi historis pengelolaan potensi sosial budaya masyarakat Palembang, peluang dan tantangan di masa mendatang.

#### **D. Kerangka Konseptual**

E.J. Hobsbawm menyebut sejarah sosial dengan "*societal history*" atau "*history of society*". Sejarah sosial menurut Hobsbawm memerlukan usaha yang membuat kerangka utuh mengenai masyarakat, dengan kata lain yang total atau global sejarah masyarakat secara keseluruhan.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan penulisan sejarah sosial sebagaimana dikatakan oleh Hobsbawm, perlu adanya sebuah model yang akan memberikan inspirasi heuristik yang berguna dalam pencarian dan pengumpulan bahan serta penyusunan.

---

<sup>24</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994, hal. 42.

Sekalipun model yang dipakai tidaklah formal dan terperinci strukturnya, setidaknya-tidaknya sebagai sebuah kerangka akan tampak lingkaran pusat (*central nexus*) atau lingkaran hubungan dari permasalahan yang akan digarap.

Pendekatan yang bersifat sinkronik dan diakronik bersifat saling melengkapi. Penggunaan dalam konteks penelitian mengenai "Sejarah Sosial Orang Melayu, Keturunan Arab dan Cina di Palembang, Dari Masa Kesultanan Palembang sampai Reformasi", memerlukan pendekatan ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, politik dan ekonomi bersinergi dengan ilmu sejarah, sebab bagi sejarawan penganut *mazhab annales* melihat substansi masa lalu masyarakat dalam konteks *structure* dan *conjuncture*.<sup>25</sup>

Model penulisan sejarah sosial menyangkut "Sejarah Sosial Orang Melayu, Keturunan Arab dan Cina di Palembang, Dari Masa Kesultanan Palembang sampai Reformasi", menggunakan model evolusi sebagaimana pembagian model penulisan sejarah sosial oleh Kuntowijoyo.<sup>26</sup> Model evolusi melukiskan perkembangan sebuah masyarakat itu berdiri sendiri sampai menjadi kompleks. Model ini juga melihat pasang surut perkembangan suatu komunitas dalam konteks perubahan zaman, termasuk didalamnya perubahan konstelasi politik dan ekonomi dalam masyarakatnya

Dalam penelitian penulis menggunakan konsep perubahan yang dikehendaki (*intende-change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned change*) yakni merupakan perubahan yang diperkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>26</sup> Kuntowijoyo menyebut ada 6 model penulisan sejarah yakni: 1) model evolusi, 2) model lingkaran konsentris, 3) model interval, 4) model tingkat



menghendaki perubahan dinamakan *agent of change* yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin atau lebih lembaga lembaga kemasyarakatan.

## E. Tinjauan Pustaka

Leo Suryadinata dalam karyanya " Dilemma Minoritas Tionghoa"<sup>27</sup>, menguraikan secara panjang lebar persoalan pribumi dan non-pri serta berbagai kebijakan penguasa terhadap keberadaan kelompok ini di Indonesia sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945. Karya ini cukup otoritatif untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan politik penguasa baik pemerintah kolonial maupun RI. Aspek yang menjadi kajian utama dari karya Suryadinata adalah posisi dan hubungan kelompok minoritas Tionghoa dalam konteks politik, ekonomi dan sosial budaya terkait konstelasi kekuasaan pemerintah. Karena sifat kajiannya yang bersifat umum dan nasional, sehingga mengabaikan karakteristik budaya lokal dari masing masing daerah di Indonesia seperti Palembang yang tentu akan berbeda dengan kultur Jawa.

Karya kedua dari Makmun Abdullah dkk, "*Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*",<sup>28</sup> terutama pada Bab II sub Bab 6 mengenai "*Kegiatan Ekonomi dan Pendidikan*", memaparkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Palembang pada permulaan abad ke-20 sampai masa revolusi fisik, peran etnik cina sebagai kelompok minoritas yang menguasai bidang ekonomi dibahas akan tetapi persoalan menyangkut kehidupan sosial politik dan

<sup>27</sup> Leo Suryadinata, *Dilemma Minoritas Tionghoa*, Jakarta : Grafitipers , 1986.

<sup>28</sup> Makmun Abdullah dkk, *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, Jakarta: Depdikbud, Proyek IDSN, 1984/1985.

ekonomi tidak dijelaskan, mungkin karena sejak awal penelitian lebih menfokuskan pada kegiatan perdagangan dan industri di Palembang secara umum.

Buku ketiga, "*Penguasa Ekonomi Dan Siasat Pengusaha Tionghoa*"<sup>29</sup>, kumpulan tulisan pada pakar yang cukup intens mengulas masalah Cina yang tergabung dalam Lembaga Studi Realino. Setidaknya beberapa artikel dalam buku ini memaparkan berbagai persoalan mendasar dan klasik menyangkut hubungan penguasa dan pengusaha (Cina) di Indonesia.

Nilai plus buku ini paling tidak terletak pada ulasan menyangkut nilai-nilai filosofi dasar kepercayaan etnik Cina yang menjadi acuan moralitas dalam kegiatan perdagangan. Sama halnya dengan beberapa buku yang membahas minoritas Cina, kelemahan mendasar buku ini ulasannya cenderung subjektif, meskipun mengutip sumber dan fakta sejarah yang cukup kredibel.

Keempat buku karya Kemas Ari, "*Masyarakat Tionghoa Palembang, Tinjauan Sejarah Sosial (1823-1945)*"<sup>30</sup> mengulas keberadaan orang-orang Cina di Palembang dari aspek sejarah dan sosial budaya seperti pola pemukiman, pola kepemimpinan, religi sampai ke masalah bahasa. Sayangnya pemaparan dan analisa penulis tidak menyinggung persoalan bagaimana posisi kelompok ini dalam konteks masa transisi pemerintahan.

Kelima artikel Lindayanti "Komunitas Orang Cina di Palembang Pada Awal Kemerdekaan Indonesia 1945-1950" dalam Ed Sedyawati dan Susanto Zuhdi (ed), *Arung*

---

<sup>29</sup> Lembaga Studi Realino, *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha*, Yogyakarta: Kanisius, 1986.

<sup>30</sup> Kemas Ari, *Masyarakat Tionghoa Palembang, Tinjauan Sejarah Sosial (1823-1945)*, Palembang: Forum Pengkajian Sejarah Sosial dan Budaya, 2003.

*Samudra, Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B Lapan*.<sup>31</sup> Karya ini meskipun bersifat ulasan singkat, akan tetapi cukup memberikan gambaran mengenai kondisi dan posisi komunitas di Palembang khususnya pada masa revolusi.

Buku keenam karya Mestika Zed, "*Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*",<sup>32</sup> buku ini merupakan disertasi Mestika Zed, fokus utama dari obyek kajian buku ini adalah menyoroti masalah-masalah kepialang politik dan evolusi di Palembang tahun 1900-1950 Meskipun tema utama buku ini menyangkut peran fungsional pialang ( *broker* ) yang terkait dengan konstelasi politik dan ekonomi berbagai kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Palembang dari permulaan abad ke-20 sampai masa revolusi. Dalam buku ini juga dibahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan jaringan perdagangan Cina di Palembang pada permulaan abad ke-20 sampai periode revolusi termasuk pasang surut hubungan pengusaha Cina dengan penguasa.

Buku terakhir karya Twan Peck Yang, "*Elite Bisnis Cina di Indonesia pada Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*"<sup>33</sup>. Karya Twang Peck yang merupakan karya yang cukup otoritatif dan lengkap dalam mengulas pergulatan etnik Cina dalam dunia perdagangan di tanah air. Dalam buku juga diuraikan secara panjang lebar pasang surut, jatuh bangun kelompok usaha dan posisi mereka terhadap penguasa

<sup>31</sup> Lindayanti, "Komunitas Orang Cina di Palembang pada Awal Kemerdekaan Indonesia 1945-1950" dalam Edi Sedyawati dan Susanto Zuhdi (ed), *Arung Samudra Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lapan*, Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lemlit UI, 2001.

<sup>32</sup> Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003.

<sup>33</sup> Twan Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1945-1950*, diterjemahkan oleh Apri Danarto, Yogyakarta: Penerbit Niagara, 2005.

karena sifatnya yang nasional serta umum, maka pembahasan mengenai aspek kelokalan konteks Palembang tidak diulas secara mendalam.

## **F. Metoda Penelitian**

Dalam penelitian penulis menggunakan metode sejarah kritis. Metode sejarah kritis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses yang disebut historiografi (Louis Gootshalk, 1986: 32). Metode penelitian tersebut terdiri dari beberapa tahapan, dimana antara tahapan permulaan dengan tahapan berikutnya saling berkaitan satu sama lain, secara garis besar tahapan dalam metode sejarah terdiri dari 4 tahap, yaitu :

1. Pencarian dan pengumpul sumber data (heuristik), yang baik yang berupa sumber-sumber tertulis maupun sumber-sumber lisan, baik yang bersifat sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dengan melacak arsip maupun dokumen yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh penulis, yakni dengan melakukan studi perpustakaan (*library rearch*) dengan mengunjungi berbagai perpustakaan yang terdapat kota Palembang seperti perpustakaan wilayah propinsi Sumatera Selatan, UNSRI, Dinas Pendidikan Nasional serta instansi terkait lainnya, maupun melacak data tersebut ke ARNAS dan Perpustakaan Nasional di Jakarta. Sedangkan sumber lisan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada para nara sumber memiliki otoritas yang berkaitan dengan tema penelitian diatas, seperti sejarawan, budayawan, tokoh masyarakat, pemuka masyarakat keturunan Arab dan Cina di Palembang serta menjangring informasi dari lapangan dari pihak yang terkait dan dengan menggunakan pendekatan "*anilisis life*

*history*<sup>34</sup> dalam kaidah ilmu antropologi atau "*oral history*"<sup>35</sup> (sejarah lisan) dalam pespektif ilmu sejarah.

2. . Kritik yaitu tahap penyeleksian sumber-sumber sejarah. Meliputi kritik eksteren dan kritik interen. Kritik eksteren ini dilakukan untuk menguji tingkat kebasahan sumber (*otentisitas* sumber) sedangkan kritik interen dilakukan untuk menguji tingkat kepercayaan sumber (*kredibilitas* sumber).
3. Interpretasi, yaitu tahap penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah diseleksi melalui upaya analisa dan sintesa fakta-fakta sejarah.
4. Historiografi, yaitu tahap penulisan sejarah pada tahap terakhir ini akan dilakukan koreksi baik secara bertahap secara total. Metode koreksi bertahap dan koreksi total diterapkan guna menghindari kesalahan-kesalahan yang sifatnya substantial, sehingga menghasilkan penulisan sejarah analitis struktural yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## G. Sistematika

Penelitian mengenai "Sejarah Sosial Orang Melayu, Keturunan Arab dan Cina di Palembang, Dari Masa Kesultanan Palembang sampai Reformasi", ini diuraikan dalam lima bab. Bab pertama menjelaskan beberapa hal seperti, latar belakang, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, output, outcome, kerangka konseptual, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>34</sup> Koentjataningrat, "Metode Penggunaan Data Pengalaman Individu" dalam *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Penyunting Koentjataningrat), Jakarta: PT. Gramedia, 1986, hal. 158-172.

<sup>35</sup> Terry Bigalke, "The Oral History Methode", dalam *Sejarah Lisan*, Jakarta: Lembaran Berita ARNAS RI, No. 9 Oktober 1982, hal. 77-83.

Bab II menjelaskan mengenai gambaran umum daerah Palembang, yang didalamnya tercakup; topografi, geografi dan demografi, kondisi sosial ekonomi dan budaya serta pola pemukiman. Bab ketiga menguraikan mengenai relasi antara pribumi (Melayu) dengan orang Cina dan orang Arab di Palembang dari Masa Kesultanan Palembang sampai Reformasi. Sedangkan bab empat, membahas arsitektur bangunan (*indis*) dan motif kain songket tradisional Palembang sebagai bentuk akulturasi budaya. Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PALEMBANG SELAYANG PANDANG

#### A. Topografi, Geografi dan Demografi Daerah Palembang

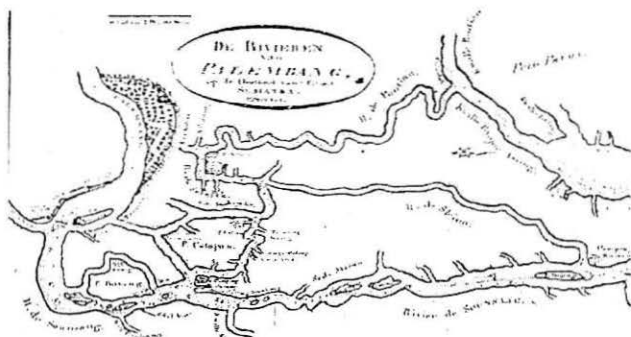
Seorang koresponden surat kabar *Het Surabajasch Handelsblad* yang sempat mengunjungi kota Palembang pada awal abad ke-20, menyebut daerah ini sebagai *Venetië van Indie*.<sup>36</sup> Tidaklah berlebihan bila kota Palembang digambarkan seperti kota Venesia (Italia), tempat asal petualang termasyhur-Marcopolo- yang pernah singgah di Aceh dalam perjalanan ke Cina pada masa lampau. Keduanya memiliki kemiripan dimana kanal-kanal sungai menjadi urat nadi kehidupan masyarakatnya menjadi pemandangan keseharian aktifitas penduduknya. Sungai Musi tidak saja dipandang sebagai sarana transportasi yang berfungsi menghubungkan kawasan hulu dengan hilir, akan tetapi melalui sungai ini pula jejak peradaban dan ide-de pembaharuan dan perkembangan kota Palembang dimasa lampau bisa dilacak kembali. Ungkapan yang menyebut penduduk Palembang dan sekitarnya dengan sebutan *Batang Hari Sembilan* berangkat dari realitas topografi daerah Palembang.<sup>37</sup>

Kota Palembang merupakan salah satu kota tertua di Nusantara, bahkan kota ini telah muncul lebih dahulu dibanding kota-kota lain di pantai Timur Sumatera, seperti Medan, Dumai dan lainnya. Berdasarkan etimologi kota

<sup>36</sup> J.F.P, "Economische Geographie van Zuid-Sumatra, " dalam *Tijdschrift voor Economische Geographie (TEG)*, 2(1911), hal. 284. Dikutip dari Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003, hal. 27.

<sup>37</sup> Batang Hari Sembilan adalah istilah yang merujuk pada sembilan aliran sungai besar yang bermuara ke Sungai Musi, kesembilan sungai tersebut antara lain; Air Klingi, Air Bliti, Air Lakitan, Air Rawas, Air Rupit, Air Batang Batang, Air Leko, Air Ogan dan Air Komering.

Palembang dengan merujuk terjemahan R.J. Wilkinson dalam kamusnya *A Malay English Dictionary* (Singapore :1903)<sup>38</sup> dengan mengacu pada kata dasarnya *lembang*, yang memiliki makna tanah yang berlekuk, tanah yang rendah, akar yang membengkak karena terendam lama didalam air. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,<sup>39</sup> kata *lembang* berarti kerut, lekung ataupun lekuk. Arti lainnya dari kata *lembang* berarti tidak tersusun rapi atau terserak-serak. Sementara menurut bahasa Melayu Palembang berarti air yang merembes atau rembesan air. Awalan *Pa* atau *Pe* menunjukkan keadaan atau tempat, sehingga makna Palembang berarti suatu tempat yang digenangi air. Faktanya di Palembang tercatat 117 buah anak sungai yang mengalir di tengah kota ini.



**Gambar. 1.**

**Peta Alur Sungai di Ibukota Palembang Tahun 1819**

Sumber: Woelders, *Het Sultanaat 1812-1815*, Amsterdam 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1975, hal. 67.

<sup>38</sup> Dikutip dari Djohan Hanafiah, 1995, *Melayu-Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 15.

<sup>39</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, 1995, *Kamus Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, Edisi kedua, hal 854.



Berdasarkan letak geografisnya sebagian besar wilayah Palembang terletak di kawasan dataran rendah dengan beberapa sungai besar dan sungai kecil yang mengalir ke pantai timur pulau Sumatera. Kondisi yang demikian bukanlah khas kota Palembang saja, sebab daerah-daerah di Sumatera bagian selatan pada umumnya juga memiliki kondisi yang sama.<sup>40</sup> Kawasan dataran tinggi bagian barat, khususnya yang terletak di antara hulu Sungai Rawas bagian utara dan sungai Komering di selatan dengan dataran tinggi Gunung Dempo (3.159 m) merupakan hulu dari sungai-sungai *Batang Hari Sembilan*.

Secara astronomi Palembang berada pada 2° 58' LS dan 105° BT. Daerah ini sebagaimana mana halnya dengan wilayah lain Nusantara beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2663 mm dan beriklim lembab.<sup>41</sup> Hampir sepanjang tahun daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut ditambah dengan curah hujan yang tinggi, sekitar 2.500-3.600 mm yang jatuh tiap bulan Agustus sampai April. Kawasan dataran rendah aliran sungai terlihat lembab dan rawan banjir. Kelembaban tersebut turut mempengaruhi struktur tanah. Sehingga cukup banyak air murni hangat yang merembes ke dalam perut bumi sehingga terjadi proses penapisan tanah hutan. Proses ini menyebabkan basa dan silikat yang mudah larut serta meninggalkan campuran oksida besi dan lempung yang sangat stabil. Proses tersebut pada akhirnya menghasilkan *feralit*, yakni sejenis tanah yang mengandung asam, rapuh dan berwarna kemerahan. Proporsi energi mineral yang dikandung yang cukup besar dan menjanjikan sumber perekonomian tambang yang potensial bagi daerah ini.

---

<sup>40</sup>

<sup>41</sup> D.G. Stibbe, *Encyclopaëdie van Nederlandsch-Indie*, Jilid III (cetakan ke-3), 's Gravenhage, Leiden, 1919, hal 270, dalam Makmun Abdullah dkk, *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, Jakarta: Depdikbud, Ditjarahnitra, IDSN, 1984/1985, hal. 12.

Geomorfologi daerah Sumatera Selatan, seperti halnya kawasan lain di pulau Sumatera memiliki struktur geologi dengan karakteristik hampir sama. Kawasan ini pada umumnya memiliki gunung berapi yang masih aktif, sedangkan sisa satu-satunya erupsi muda hanyalah terdapat di bagian Selatan, yang saat ini menjadi lapisan sukadana basalt. Pada masa pleotosen daerah ini mengalami pelengkungan yang kemudian patah secara *longitudinal*, sehingga patahan sekarang menjadi lembah Semangko yang memanjang dari Teluk Semangko menuju ke bagian Utara sampai ke Sumatera Tengah.<sup>42</sup> Daerah pantai Barat merupakan dataran aluvial yang sempit dan berkelok-kelok, sedangkan di bagian Timurnya merupakan dataran aluvial yang lebar, membentang dari ujung Sumatera Selatan sampai ke Sumatera Utara.

Karakteristik lingkungan fisik daerah Palembang secara sederhana terdapat dua pola utama yakni pola *iliran* dan *uluran*.<sup>43</sup> Istilah ini merujuk pada kawasan dataran rendah dan dataran tinggi dalam terminologi masyarakat lokal Palembang. Perbedaan karakteristik wilayah pada gilirannya berimplikasi pada perbedaan sosial ekonomi dan kultur kedua pola tersebut. Klasifikasi perbedaan kedua pola di atas setidaknya mulai menemukan wujudnya pada masa Kesultanan Palembang serta lebih intensif mengkristal ketika Palembang berada di bawah hegemoni Kolonial Belanda.

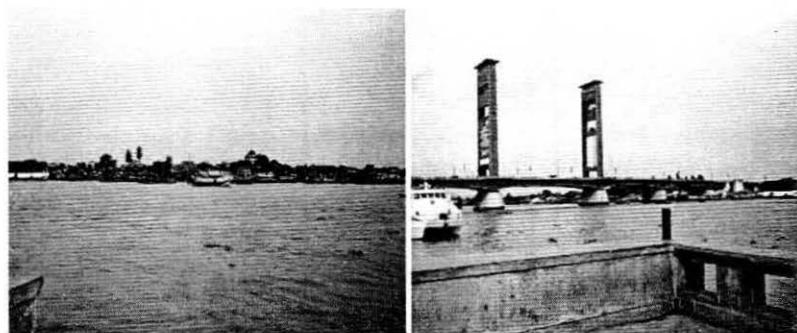
Posisi geografis Palembang yang berada di dekat muara Sungai Musi serta terhubung dengan delapan anak sungai yang bermuara di sungai ini. Melalui anak-anak sungai tersebut lalu lintas perdagangan dan komunikasi antar

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> Konsep *iliran* dan *uluran* merupakan konsep zone geografis yang terbentuk dari kondisi realitas kenampakan fisik geologinya. Uraian menarik mengenai konsep ini dan pengaruhnya terhadap penduduk dapat dibaca dari buku Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003, hal; 34-47.

penduduk yang tinggal di Ulu dengan Hilir terjalin. Selain itu posisi muara Sungai Musi yang menghadap ke Selat Bangka memiliki nilai strategis dan ekonomi, karena kedudukannya sebagai tempat penghubung (transit) antara Jawa dan Malaka.



**Gambar 2.**  
**Sungai Musi dan Kehidupan Masyarakat Palembang**  
**(dok. penulis)**

Dalam perspektif demografi serta sosial budaya, daerah Palembang merupakan daerah yang unik dimana terjadi perpaduan antara budaya Melayu, Jawa, Cina, Arab maupun kelompok etnis lainnya. Sejarah panjang Palembang dari masa klasik-Kerajaan Sriwijaya-, kemudian pengaruh Islam-Kesultanan Palembang- sampai penjajahan bangsa Barat (Belanda) telah melahirkan bentuk struktur sosial masyarakat Palembang yang dinamis di setiap masanya. Sehingga beberapa penulis menyebut daerah ini dengan berbagai istilah merujuk keunikan tersebut, seperti "Palembang sebagai Melayu-Jawa", "Hadramaut (Yaman Selatan) kedua" serta sebutan lainnya.

Pada masa Kesultanan Palembang, menurut taksiran Sevenhoven jumlah orang Arab sekitar 500 jiwa dan orang

Cina 800 jiwa.<sup>44</sup> Kemudian penduduk Palembang mengalami perubahan seiring dengan kemajuan wilayah ini, berdasarkan sensus penduduk tahun 1915 jumlah penduduk Palembang diperkirakan 650.000 jiwa yang terdiri dari 800 orang Eropa, 7000 orang Cina, 2.200 orang Arab dan 200 orang Keling dan sisanya pribumi.<sup>45</sup> Selanjutnya pada tahun 1930 jumlah penduduk Palembang mengalami perubahan dua kali lipat selama 15 tahun, sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Penduduk Berdasarkan Etnik di Palembang Tahun 1930**

| No    | Wialayah               | Etnik |           |        |         | Total     |
|-------|------------------------|-------|-----------|--------|---------|-----------|
|       |                        | Eropa | Pribumi   | Cina   | Lainnya |           |
| 1.    | Benedenland en (Iilir) | 2.557 | 528.705   | 18.922 | 4.285   | 544.469   |
| 2.    | Bovenlanden (Ulu)      | 1.117 | 25.773    | 5.523  | 331     | 332.744   |
| 3.    | Ogan dan Komering      | 153   | 207.489   | 1.621  | 79      | 209.342   |
| Total |                        | 3.287 | 1.061.967 | 26.066 | 4.695   | 1.096.565 |

Sumber: Indisch Verslag, 1931: 13, dalam Mestika Z, *The Dualistic Economy of Palembang in the late Colonial Period*, editor Thomas J. Lindblad, *Historica foundation of a national economy in Indonesia, 1890s-1990s*, North-Holland, Amsterdam/Oxford/New York/Tokyo: Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen Verhandeligen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 167, 1996, hal. 250.

<sup>44</sup> J.L. Sevenhoven, *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, Jakarta: Bhratara, 1971, hal. 33.

<sup>45</sup> Makmun Abdullah, *op.cit.*, hal 90

Pada masa pendudukan Jepang tidak diketahui secara pasti data statistik penduduk Palembang. Kondisi yang serba darurat serta visi pemerintahan Jepang yang lebih mengutamakan kepentingan persiapan perang menghadapi sekutu. Maka seluruh aktifitas kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat ditujukan untuk kepentingan perang. Setelah Indonesia merdeka sampai masa reformasi, pencatatan statistik, tidak lagi menyebutkan asal-usul suku bangsa. Pada masa akhir kekuasaan orde lama sampai tahun 1980-an jumlah penduduk kota Palembang berkembang pesat, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 2. Penduduk Kota Palembang Per Kecamatan Tahun, 1961, 1971 dan 1980**

| Kecamatan       | Tahun   |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|
|                 | 1961    | 1971    | 1980    |
| Ilir Timur I    | 97.663  | 116.189 | 147.415 |
| Ilir Timu II    | 91.089  | 127.099 | 186.517 |
| Ilir Barat I    | 65.573  | 83.587  | 113.963 |
| Ilir Barat II   | 54.013  | 62.548  | 79.367  |
| Seberang Ulu I  | 83.993  | 100.515 | 142.992 |
| Seberang Ulu II | 82.670  | 89.909  | 116.353 |
| Jumlah          | 474.971 | 579.847 | 786.607 |

Sumber : Memori Serah Terima Jabatan Walikotaamadya Kepala Daerah Tk II Palembang Periode tahun 1978 s/d 1983 hal. 9.

Dari tabel diatas terlihat gerak perubahan penduduk kota Palembang, pada periode tahun 1960-an, jumlah keseluruhan penduduk Palembang berjumlah 474.971 jiwa, kemudian pada tahun 1980-an hampir mendekati 2 (dua) kali lipat, yakni 786.607 jiwa. Pada dekade tahun 1980-an keatas tepatnya 5 tahun kemudian, penduduk Palembang telah berubah menjadi 929.529 jiwa pada tahun 1985. Penduduk kota Palembang pada masa reformasi, tepatnya (4) empat

tahun setelah peristiwa reformasi, tahun 2002 sebanyak 1.451.776 jiwa, tersebar pada 14 (empat belas) kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Ilir Timur II, yaitu sebanyak 178.725 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah di Kecamatan Gandus sebanyak 52.707 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata Kota Palembang adalah 3.624 jiwa per km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk dan kepadatannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. Luas Wilayah dan Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Palembang**

| NO    | KECAMATAN       | LUAS (Km <sup>2</sup> ) | PENDUDUK  |           |
|-------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|
|       |                 |                         | JUMLAH    | KEPADATAN |
| 1     | Plaju           | 15,17                   | 91.267    | 6.016     |
| 2     | Seberang Ulu II | 10,69                   | 92.267    | 8.631     |
| 3     | Seberang Ulu I  | 17,45                   | 157.593   | 9.034     |
| 4     | Kertapati       | 42,56                   | 86.439    | 2.031     |
| 5     | Gandus          | 68,78                   | 52.707    | 766       |
| 6     | Ilir Barat I    | 19,77                   | 117.354   | 5.936     |
| 7     | Ilir Barat II   | 6,22                    | 75.073    | 12.062    |
| 8     | Bukit Kecil     | 9,92                    | 54.035    | 5.447     |
| 9     | Ilir Timur I    | 6,50                    | 90.234    | 13.882    |
| 10    | Kemuning        | 9,00                    | 95.083    | 10.565    |
| 11    | Ilir Timur II   | 25,58                   | 178.725   | 6.987     |
| 12    | Kalidoni        | 27,92                   | 89.275    | 3.197     |
| 13    | Sako            | 42,5                    | 101.427   | 2.386     |
| 14    | Sukarami        | 98,56                   | 170.297   | 1.728     |
| TOTAL |                 | 400,61                  | 1.451.776 | 3.624     |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang, 2002

## B. Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Budaya

Palembang dengan kondisi geografis berupa dataran rendah yang berawa-rawa, tanah datar dan tanah tinggi yang bergelombang . Pada musim kemarau suhu udara kota

Palembang mencapai 32<sup>0</sup> C, sedangkan pada musim penghujan 25<sup>0</sup> C dengan rata-rata suhu udara dalam setahun 27<sup>0</sup> C. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila di daerah Palembang dan sekitarnya cukup subur, terutama didaerah tanah datar dan tinggi bergelombang banyak ditanamai penduduk dengan tanaman lada, kopi, tembakau, cengkeh dan buah-buahan. Daerah yang agak jauh sedikit ke pedalaman, banyak menghasilkan buah-buahan.

Wilayah kota Palembang yang sebagian besar terdiri atas rawa-rawa, penduduknya lebih berorientasi pada kegiatan perdagangan dari pada pertanian. Meskipun kondisi lahan tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan bercocok tanam, tetapi ada juga tempat-tempat tertentu yang penduduk Palembang sebut "talang". Istilah talang merujuk pada suatu tempat yang agak tinggi posisinya dari tempat-tempat lainnya, untuk dijadikan sebagai lahan persawahan. Setelah berakhirnya musim panen, lahan tersebut ditanami pohon karet atau buah-buahan.<sup>46</sup>

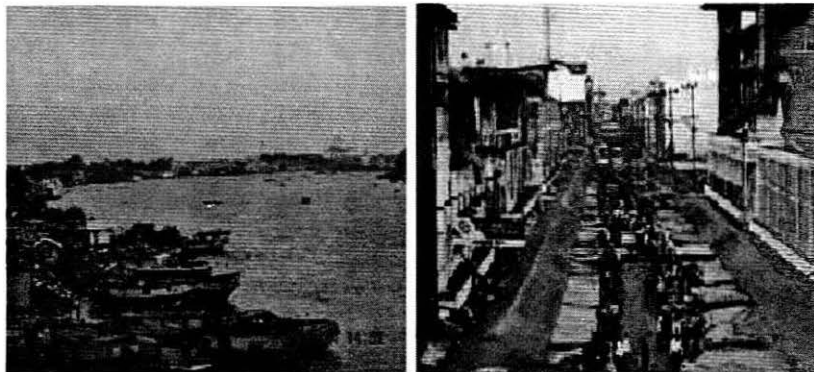
Mengingat kondisi alam kota Palembang yang demikian, maka profesi dijalani oleh penduduk selain bergerak dilapangan perdagangan, mereka juga menjalankan usaha kecil seperti pengrajin ataupun sebagai pekerja kasar. Khusus bagi kaum perempuan, mereka bergiat dilapangan kerajinan tangan (songket), seperti menenun songket, menyulam, menjahit dan sebagainya.

Wilayah bagian barat Kota Palembang, merupakan kawasan hulu dimana mengalir sungai-sungai yang bisa dilayari dengan kapal dan perahu motor sampai ke bagian pedalaman. Kapal dan perahu motor tersebut merupakan pasar terapung yang membawa barang dagangan untuk ditukarkan dengan hasil bumi yang berasal dari kawasan pedalaman. Palembang telah menjelma bandar transito yang

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 15-17.

menghubungkan daerah hulu dengan hilir mulai awal abad ke-20.



**Gambar 3.**  
**Sungai Musi dan Pasar 16 Ilir Palembang**  
(Sumber: Pemda Sumsel )

Kawasan pedalaman yang berada di dataran tinggi dibagian barat Palembang, merupakan daerah penting penghasil komoditas hasil hutan, seperti damar, getah perca, jelutung dan rotan. Pada masa kolonial tepatnya pada pertengahan awal abad ke-20, yakni dari tahun 1916-1917, komoditas hasil hutan seperti diatas menjadi komoditas utama bagi penduduk Palembang, mengalami pasang-surut sesuai dengan permintaan pasar, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel. 3. Hasil Hutan Palembang Tahun 1916-1917**

| Hasil Hutan     | Tahun        |              |
|-----------------|--------------|--------------|
|                 | 1916         | 1917         |
| Damar           | 413.244 kg   | 305.661 kg   |
| Getah Perca     | 10.031 kg    | 11.749 kg    |
| Getah Jelantung | 3.413.444 kg | 1.318.341 kg |
| Rotan           | 4.704.626 kg | 549.145 kg   |

Sumber: *Kolonial Verslag 1928* dalam Makmun Abdullah dkk, *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, Jakarta: Depdikbud, Ditjarahnitra, IDSN, 1984/1985, hal. 18.

Berdasarkan catatan harga yang berlaku pada waktu itu, yakni damar per pikul harganya f. 7.00, sampai dengan f. 20.00, getah perca per pikul f. 6.00 sampai dengan f. 100.00, getah jelantung per pikul harganya f. 4.00, sampai dengan f. 12.00 dan harga rotan per pikul f. 3.00, sampai dengan f. 7.00. Tentu saja hal ini menambah pemasukan bagi penduduk disamping mereka memperoleh hasil perkebunan milik mereka, seperti lada, kopi dan tembakau.

Jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda berkuasa di Palembang, masyarakat disini telah memiliki pemerintah tradisional "marga", yang keberadaannya diperkirakan telah ada sejak masa Kesultanan Palembang. Bahkan sistem pemerintahan marga ini merupakan model pemerintahan "genuine" (asli) Palembang yang berevolusi mengalami beberapa tahap sebagaimana teori Van Royen tentang marga yang menyatakan perkembangan marga melalui beberapa tahapan, yakni sebagai berikut: tahap pertama, orang kubu merupakan kelompok masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan, mereka berburu, meramu dan menangkap ikan. Pada fase ini kelompok masyarakat tersebut memiliki ciri utama, yakni mereka sering berpindah-pindah tempat-*nomaden*- bersama anggota kelompoknya. Tipe kelompok pertama ini yang kemudian dianggap sebagai asal mula

kesatuan-kesatuan genealogis yang merupakan benih awal terbentuknya masyarakat hukum adat bersifat genealogis yang kemudian menjadi genealogis teritorial.

Tahap kedua, kelompok-kelompok masyarakat nomaden tadi, sudah memiliki keinginan untuk tinggal menetap serta mulai aktifitas bercocok tanam sebagai tumpuan hidupnya. Kelompok-kelompok ini mendirikan dusun sebagai tempat tinggal permanen berdasarkan ikatan kekerabatan dari leluhur (*puyang*) tertentu. Tahap ketiga, dusun-dusun permanen tersebut kemudian mengambil batas-batas teritorial mereka berdasarkan batas alami yang disekitarnya, seperti sungai, lembah atau gunung. Tahap keempat, dengan terjadinya penambahan penghuni di masing-masing rumpun yang ada di tiap-tiap dusun, lama-lama mereka membentuk rumpun baru. Hubungan mereka sebagai suatu kesatuan kelompok belum terputus, kecuali jika jarak antar rumpun semakin jauh, maka terbentuklah rumpun dengan dusun-dusun yang berdiri sendiri, sehingga memunculkan kesatuan masyarakat yang bersifat genealogis teritorial. Tahap terakhir, ketika percampuran antar rumpun serta mulai pudarnya ikatan genealogis yang bersumber pada *puyang* mulai kabur, sehingga yang lebih menonjol ikatan teritorialnya dibanding ikatan genealogisnya, dari sinilah timbulah istilah "marga" sebagai kesatuan masyarakat adat.<sup>47</sup>

Sistem marga ini tetap bertahan, meskipun mengalami perubahan menyangkut perubahan teritorialnya seiring perkembangan wilayah ini serta pemerintahan yang silih berganti mengendalikannya dari masa Kesultanan Palembang sampai Indonesia merdeka. Sistem pemerintahan marga mulai dihapuskan sejak pemerintah orde baru mengeluarkan UU No .5 tahun 1978, mengenai pokok - pokok pemerintah

---

<sup>47</sup> Hambali Hasan dkk, *Sejarah Rakyat dan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin*, Palembang: Unsri, 2007/2008, hal 23-24.

desa, yang menjadikan model pemerintahan terendah di luar Jawa harus mengikuti sistem ini.

Sebagian besar penduduk Palembang menganut agama Islam, bahkan sejak masa Kesultanan agama Islam telah diakui sebagai resmi kerajaan. Meskipun begitu sisa tradisi pra Islam masih ada seperti percaya kepada hal yang bersifat mistis. Tradisi leluhur masih tetap dilakukan terutama menyangkut *life cycle*, seperti kelahiran, perkawinan, kelahiran kematian atau kegiatan tradisi lainnya. Fenomena budaya seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Palembang, sebagaimana masyarakat Indonesia lainnya berada dalam tahap transisi dari masyarakat tradisional ke modern.

Keluarga batih majemuk pada masyarakat Palembang, terdiri dari anak-anak yang belum atau telah menikah serta cucu-cucunya. Bagi anak perempuan yang sudah menikah diberikan kelonggaran untuk tinggal bersama orang tuanya. Sedangkan bagi anak laki-laki yang sudah menikah mereka harus keluar dari rumah orang tuanya. Meskipun anak perempuan diperbolehkan tinggal bersama orang tuanya, akan tetapi masalah harta warisan, berdasarkan hukum Islam-*faraid*- dimana anak laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar dari pada anak perempuan.

Perkawinan yang ideal dalam pandangan masyarakat Palembang adalah perkawinan antara dua bersaudara sepupu, dari orang tua laki-laki dan perempuan yang sekandung. Meskipun perkawinan ideal ini diharapkan oleh mereka, tetapi hal tersebut tidak bersifat wajib. Perkawinan yang dilaksanakan menurut tradisi setempat dengan berbagai ritual adat yang teratur dan bertahap disebut dengan istilah "rasan tuo", sebaliknya mereka yang tidak melakukan seperti ketentuan adat disebut "melarai" (kawin lari). Hal ini bisa terjadi kalau pinangan dari pihak laki-laki ditolak dari pihak keluarga perempuan yang disebabkan oleh uang jujur yang

diminta oleh pihak perempuan tidak bisa dipenuhi oleh pihak laki-laki, misalnya uang jujurnya terlalu mahal.

Untuk memperluas ikatan kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Palembang dahulu, yang telah berkembang sejak dari masa Kesultanan adalah kebiasaan menyusukan anak-anak mereka pada wanita lain yang tidak memiliki hubungan keluarga, sebagaimana tradisi Islam. Tradisi ini memiliki maksud dan tujuan agar anak yang disusui mendapat perlindungan dari keluarga yang menyusunya. Tradisi ini sering dikatakan sebagai "tradisi berfajar" yakni suatu cara yang dilakukan oleh pemuka-pemuka masyarakat agraris dalam memperluas dan mempererat ikatan kekerabatan atas dasar teritorial.<sup>48</sup>

Dalam komunikasi sehari-hari, bahasa Melayu dialek Palembang merupakan bahasa pengantar yang dipergunakan oleh sebagian besar penduduk Palembang. Bahasa Melayu Palembang merupakan bahasa Melayu yang sudah mengalami modifikasi serta percampuran dengan bahasa dari luar, terutama dari bahasa Jawa. Sehingga sering kali kita menemukan kosa kata dari bahasa Jawa yang dipakai disini seperti wong (orang), banyu (air) dan lainnya. Secara gramatikal bahasa Melayu Palembang dicirikan dengan penambahan bunyi (o) pada bagian huruf terakhir katanya, misalnya: *kemana-kemano, apa-apa, tiga-tigo* dan sebagainya.

### C. Pola Pemukiman

Pola pemukiman masyarakat Palembang tidak bisa dilepaskan dari struktur ekologiannya. Keberadaan sungai Musi beserta sungai-sungai lainnya yang berhubungan satu sama lain, menjadikan Palembang dikatakan sebagai Venesia dari Timur. Kondisi geografis Palembang yang terdiri aliran sungai

<sup>48</sup> Makmun Abdullah dkk, *op.cit*, hal. 23-24.

serta tanah rawa, menciptakan model pemukiman yang bersifat linear memanjang mengikuti alur sungai yang ada.

Pada masa Kesultanan Palembang ada aturan dalam hal masalah tempat tinggal mereka terutama bagi mereka yang dikategorikan sebagai penduduk luar (asing) seperti orang Cina dan Arab. Bagi orang Cina mereka hanya diperbolehkan tinggal pada "rumah rakit" . Rumah rakit merupakan rumah terapung yang berada di atas aliran sungai Musi. Ketentuan bagi orang Cina hanya boleh bermukim di rumah rakit, dengan maksud dan tujuan agar pihak Kesultanan Palembang mudah mengawasi serta sewaktu-waktu bisa membakarnya apabila kelompok ini dianggap melawan kekuasaan Sultan.

Keberadaan rumah rakit sampai sekarang masih dapat ditemukan disekitar sungai Musi. Rumah rakit selain berfungsi sebagai tempat tinggal, sekaligus berfungsi sebagai tempat usah, bahkan saat ini fungsi rakit juga dijadikan obyek pariwisata bagi pemerintah kota Palembang. Sedangkan bagi orang Arab diperbolehkan tinggal di sekitar kawasan istana Kesultanan Palembang. Hal ini karena kelompok ini secara religi dianggap memiliki kelebihan dalam pandangan pihak Kesultanan Palembang.



**Gambar 4.**  
**Rumah Rakit di Sungai Musi, dulu dan sekarang**  
**(Sumber: Pemda Sumsel )**

Pada masa kolonial Belanda Belanda, pemukiman untuk golongan Timur Asing seperti orang Cina dan Arab tidak mengalami perubahan, sebab pemerintah Kolonial Belanda lebih menitik beratkan pada pembangunan yang mengarah ke bagian barat sungai Musi (dari Seberang Ilir). Sehingga kawasan bagian Seberang Ilir banyak ditemukan pemukiman, perkantoran, benteng pertahanan Belanda (Benteng Kuto Besak) serta pasar Sekanak (16 Ilir) yang menjadi sentra perdagangan kota Palembang.

Pemukiman bagi komunitas keturunan Arab terkonsentrasi pada beberapa tempat di kota Palembang, terutama di Kampung 7 Ulu, 12 Ulu, 13 Ulu dan 14 Ulu. Posisi perkampungan Arab di 12 Ulu, 13 Ulu dan 14 Ulu letaknya saling berdekatan. Ketiga perkampungan ini terletak di tepi sungai Musi dan ditengah perkampungan ini mengalir anak-anak sungai Musi, seperti perkampungan Arab 12 Ulu yang dilewati oleh sungai Lumpur, perkampungan Arab 13 Ulu yang dilewati oleh sungai Ketemenggungan dan perkampungan Arab 14 Ulu yang dilewati oleh sungai Kapar.

Perkampungan Arab di ketiga perkampungan tersebut ditempati oleh orang-orang keturunan Arab dari suku-suku seperti Al-Habsyi, Al-Munawar, Al-Haddad dan Al-Khaf. Sedangkan perkampungan arab di 7 Ulu lebih banyak ditempati oleh suku Al-Haddad, Al-Alatas dan Al-Sahab. Orang-orang Arab yang menghuni di daerah 7 Ulu, dulunya berasal dari Seberang Ilir yang berpindah pada abad ke-18.

Kondisi fisik perumahan orang-orang Arab di sekitar sungai Musi, terutama milik orang Arab yang kaya, terlihat lebih nyaman dan lebih bersih. Menurut pengamatan Berg, seorang pegawai kolonial Belanda yang pernah mengunjungi Palembang pada abad ke-18, menyatakan bahwa perumahan orang Arab berbentuk rumah panggung. Bahan rumah berasal dari kayu, akan tetapi yang kelihatan mencolok adalah perabotan rumah mereka yang lebih besar dari pada

perabotan milik pribumi (Melayu). Rumah-rumah orang Arab yang terpandang dari sisi intelektual, terlihat jelas dari tumpukan kitab, naskah dan buku dibagian kamar tamunya serta terlihat simbol-simbol kemakmuran seperti senjata yang terbuat dari logam tertentu. Dan ciri lainnya yang terlihat umum, pada bagian yang menjorok ke tepi sungai terdapat bangunan kecil-mushalla- sebagai tempat peribatan.<sup>49</sup>

Pemukiman Cina di Palembang lebih menyebar bila dibandingkan kolega mereka (Arab). Meskipun begitu kita masih menemukan jejak dimana rumah kapiten Cina di Palembang, yakni di kampung 7 Ulu. Berbeda dengan rumah orang Kaya Arab yang digambarkan oleh bersih oleh Berg, rumah orang Arab kebanyakan dikatakan kondisinya lebih kotor bila dibandingkan pemukiman orang Cina.



**Gambar 5.**  
**Rumah Kapiten Cina di Kampung 7 Ulu Palembang**  
(Sumber:dok penulis)

Dari dahulu sampai sekarang yang sering kali menjadi permasalahan kota Palembang di sektor infrastruktur adalah persoalan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas umum. Kota

---

<sup>49</sup> Jumhari dkk, *Arab Palembang Dari Masa Kesultanan Sampai Akhir Kolonial, Suatu Kajian Sejarah Sosial*, Padang: BKSNT, 2006, hal.32-34.

Palembang yang khas karena dibelah dan dikelilingi Sungai Musi dan anak-anak sungainya, seharusnya lebih tepat menjadi kota sungai (*Venice from the East*), namun sayangnya pola pembangunan pada era lalu sangat kuat dengan visi penyeragaman, sehingga dibentuk sedemikian rupa menjadi kota daratan sebagaimana kota-kota lain di Pulau Jawa. Aliran sungai menjadi sempit, bahkan tertutup, rawa-rawa pun ditimbun lalu ketika hujan turun, genangan air dan banjir terjadi di mana-mana. Kurang baiknya penataan kota adalah masalah utama Kota Palembang yang dampaknya membias kemana-mana misalnya masalah sosial seperti maraknya pengemis jalanan, PKL yang sulit ditertibkan, sampai arus lalu lintas yang di beberapa tempat terasa semrawut tidak terlepas dari soal penataan kota yang sejak awal kurang tepat. Akibatnya ketika desakan penduduk dan aktivitas ekonomi menuntut kota dikembangkan semakin pesat, berbagai permasalahan sosialpun muncul.

Air bersih yang dikelola oleh PDAM Tirta Musi merupakan satu-satunya perusahaan milik Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam memberikan pelayanan air bersih. Terdapat 7 (tujuh) instalasi di unit PDAM termasuk WTP (*Water Treatment Plant*) yang menggunakan sumber baku dari beberapa sungai, yang terbanyak adalah Sungai Musi. Instalasi 3 Ilir, Rambutan, Poligon, Taba dan Karang Anyar dan 15 Ulu (rencana akan ada perbaikan dan dihidupkan kembali) menggunakan sumber air baku dari Sungai Musi. Debit dari 7 (tujuh) instalasi terpasang mempunyai kapasitas 2.895 liter/detik.

Kota Palembang dengan jumlah penduduk sebanyak 1.262.682 jiwa yang terlayani kebutuhan air bersihnya dari PDAM Tirtamusi baru sekitar 62,29% saja. Itupun kualitas air di sejumlah tempat masih sering dikeluhkan warga karena keruh dan bau. Padahal sumber mata air untuk Palembang



sangat melimpah karena Sungai Musi dan beberapa anak sungai mengelilingi kota ini.

Pengelolaan air limbah atau sanitasi di Kota Metropolitan Palembang masih belum dikelola dengan terpadu terutama untuk pengelolaan limbah rumah tangga. Pada saat ini, pengelolaan air limbah tersebut masih mengikuti pola aliran air dalam rangka penampungan air hujan. Pengelolaan air limbah yang terdiri dari 283.741 rumah yang ada di Kota Palembang belum termasuk dalam sistem yang baik. Sistem drainase yang ada belum seluruhnya dikelola dengan baik. Beberapa diantaranya masih berupa saluran yang belum diperbaiki dan belum dilengkapi dengan kolam retensi. Program yang perlu dilaksanakan adalah normalisasi dan lineasi pada daerah-daerah yang masih mengalami genangan seperti pada sistem drainase Bendung, pengaturan pipa jaringan air minum yang banyak melintang di atas saluran drainase karena dapat menghambat pengaliran air dan sebagainya.

Kota Palembang memiliki keadaan geografis kawasan yang datar. Terdapat sungaisungai besar (Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai Kramasan) dan Anak-anak sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut serta struktur tanah yang tidak menyerap air sehingga menjadi kendala bagi tata air kota Palembang. Kondisi demikian, menyebabkan terjadinya genangan air di banyak tempat pada saat hujan ataupun sungai pasang. Genangan air ini terjadi di jalan-jalan Arteri, jalan lingkungan, permukiman, wilayah komersial dan lahan-lahan kosong.

Pola pemukiman masyarakat Palembang di sekitar Musi, terlihat indah dan memiliki tata kelola yang menarik. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan pariwisata air, khususnya dengan menyusuri sungai Musi, beberapa tempat yang dianggap memiliki nilai sejarah, termasuk perkampungan Arab dan tempat tinggal bekas Kapiten Cina. Kota Palembang

dengan *land mark*-nya Jembatan Musi memiliki khas yang tidak dimiliki oleh kota lain di wilayah Indonesia. Peradaban sungai (*riverine culture*), dengan sungai Musi sebagai media utama yang menghubungkan jejak peradaban dari masa lampau ke zaman modern.



**Gambar 6.**  
**Pola Pemukiman di Sungai Musi dilihat dari atas melalui foto udara (Sumber: Pemda Sumsel)**

### BAB III

## RELASI ANTARA ORANG MELAYU DENGAN ORANG CINA DAN ORANG ARAB DI PALEMBANG

### A. Masa Kesultanan Palembang

Berdirinya Kesultanan Palembang pada pertengahan abad ke-16 Masehi, tidak bisa dilepaskan dari kemelut yang menimpa Kerajaan Islam Demak yang mengalami perpecahan akibat perebutan kekuasaan pada tahun 1546 setelah meninggalnya Sultan Trenggana. Aria Jipang atau lebih dikenal dengan nama Aria Penangsang (anak dari adik Pangeran Trenggana, Pangeran Sekar Seda ing Lepen) merasa berhak atas tahta Demak. Ia berhasil membunuh Pangeran Prawata (anak Pangeran Trenggana). Konflik dan suksesi yang terjadi di Keraton Demak pada akhirnya mengakibatkan runtuhnya kerajaan ini. Sebab setelah kemenangan Sultan Adiwijaya atas Aria Penangsang, pusat kerajaan dipindahkan ke daerah Pajang. Dari beberapa pengikut setia dari Aria Penangsang melarikan diri keluar, salah satunya ke wilayah Palembang dibawah pimpinan Ki Gede ing Suro.<sup>50</sup>

Ki Gede ing Suro memerintah selama 17 tahun, setelah meninggalnya Ki Gede ing Suro, tampuk pemerintahan diserahkan kepada penggantinya Ki Gede ing Suro Mudo. Ia memerintah dari tahun 1545-1575 serta dianggap sebagai cikal bakal penguasa Kerajaan Palembang sampai akhir Kesultanan Palembang. Pada sekitar tahun 1575 Ki Gede Suro ing Mudo wafat dan dimakamkan di I Ilir

---

<sup>50</sup> Bambang Budi Utomo dkk, *Perkembangan Kota Palembang Dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern*, Palembang: Pemkot Palembang, 2005, hal. 166. Lihat juga, Jumhari dkk, *Arab Palembang Dari Masa Kesultanan Sampai Kolonial Belanda, Suatu Kajian Sejarah Sosial*, Padang: BKSNT, 2006, hal. 45.

sebagai penggantinya adalah Ki Mas Adipati yang mempunyai 4 orang putra serta seorang putrid. Tahun 1588 Ki Mas Adipati digantikan oleh putranya, Den Arya yang kemudian terbunuh karena kelakuannya yang kurang baik. Den Arya kemudian digantikan oleh adiknya yang bernama Pangeran Madi Angsoka yang memerintah sampai tahun 1623.<sup>51</sup>

Penguasa Palembang yang ke-5 adalah Pangeran Madi Alit dari Pangeran Madi Angsoka, yang memerintah dari tahun 1629-1630. Tampuk kekuasaan Palembang selanjutnya diserahkan kepada adiknya, Pangeran Seda ing Pura (1630-1639). Karena tidak berputra, kekuasaannya dilanjutkan oleh menantu dari adik perempuannya (Nyai Gede ing Pembayun), yakni Ratu Sinuhun (Pangeran Seda ing Kenayan) yang memerintah Palembang tahun 1639-1650. Ia digantikan oleh adiknya, Pangeran Sideng Pasarean (1650-1651). Pemerintahannya hanya berlangsung selama setahun, yang kemudian digantikan oleh Pangeran Side ing Rejek, pada masa pemerintahannya hubungan Palembang dengan VOC memburuk, yang berakibat keraton Kuto Gawang dibakar habis, sedangkan Side ing Rejek melarikan diri ke Saka Tiga dan meninggal disana.

Struktur pemerintahan Kesultanan Palembang dibagi atas pemerintahan di ibu kota dan daerah pedalaman yang disebut daerah *uluan*, yang merupakan wilayah hulu dari Sungai Batanhari Sembilan. Daerah *uluan* memiliki tiga wilayah pemerintahan yakni: daerah *sikep*, daerah *kepungutan* dan daerah *sindang*. Daerah *sikep* memiliki keistimewaan yakni, mereka merupakan kelompok dusun yang tidak berada dibawah kekuasaan marga. Akan tetapi langsung dibawah kekuasaan Sultan Palembang. Mereka dibebaskan dari keharusan membayar pajak, tetapi mereka punya kewajiban kerja kepada Sultan. Kerja untuk Sultan ini disebut *gaweraja*

---

<sup>51</sup> *Ibid.*,

adalah kerja yang bersifat langsung kepada Sultan; seperti mengayuh perahu (*pengayuh*) dan penunjuk jalan (*perpat*).<sup>52</sup>

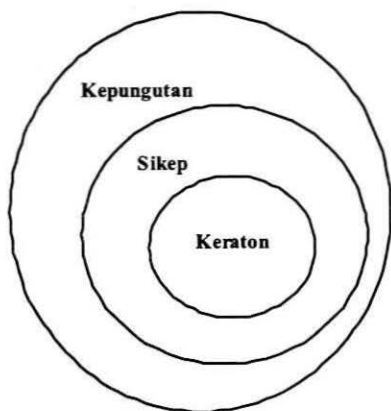
Daerah *Kepungutan* merupakan daerah Kesultanan Palembang yang berada di pedalaman yang dipimpin oleh seorang *raban* dan *jenang*.<sup>53</sup> Posisi *raban* dan *jenang* adalah jabatan perantara antara Sultan dengan *pasirah* (kepala marga). Mereka memperoleh penghasilan dari pajak atau cukai berupa hasil bumi yang dikumpulkan oleh *pasirah*, yang kemudian diserahkan kepada Sultan.

Daerah Sindang merupakan daerah perbatasan dengan wilayah *kepungutan*, yang bersifat otonom, seperti daerah Pasemah. Daerah Sindang merupakan wilayah sekutu Kesultanan Palembang yang dipimpin oleh seorang *Depati* (raja kecil) yang bebas, tidak dibebani pajak dan upeti. Akan tetapi mereka memiliki kewajiban melindungi daerah perbatasan kesultanan dari serbuan orang. Diantara Sultan dan penguasa dari daerah Sindang memiliki kewajiban *tiban-tukon* sebagai *tanda raja*. *Tiban-tukon* merupakan bentuk transaksi perdagangan sistem barter antara pihak kesultanan dengan para *depati* di daerah Sindang. Sultan mengirimkan barang-barang seperti garam, kain, panci besi, obat-obatan dan lain-lainnya yang diperoleh dari pedagang Arab dan Cina kepada para *depati*. Sebaliknya para *depati* mengirimkan beras, kapas, damar, lada serta hasil hutan lainnya kepada Sultan. Struktur wilayah Kesultanan Palembang dapat dilihat dibawah ini:

---

<sup>52</sup> Sevenhoven, *Lukisan tentang IbukotaPalembang*, Jakarta: Bhratara, 1977, hal. 30.

<sup>53</sup> *Raban* dan *Jenang* merupakan gelar untuk jabatan yang sama, perbedaannya adalah kalau *Raban* berasal dari golongan bangsawan, sedangkan *Jenang* berasal dari masyarakat biasa.



**Gambar. 7**  
**Struktur Wilayah Kesultanan Palembang**

Pada masa Kesultanan Palembang penduduk daerah ini dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok priyayi dan rakyat. Priyayi berarti keturunan raja atau kerabat raja, golongan priyayi dibagi lagi menjadi tiga golongan yaitu; *pangeran*, *raden* dan *masaagus*. *Pangeran* berasal dari kata *pengheran* yang berarti yang memerintah. Gelar ini hanya boleh diberikan oleh raja. Golongan *raden* berarti tinggi (luhur) sedangkan *masaagus* berarti berharga banyak.<sup>54</sup> Untuk anak-anak perempuan dari keluarga priyayi mereka memiliki sebutan pula seperti; istri sultan gelar sebutannya *ratu*, kemudian untuk anak perempuan atau istri dari keluarga *raden* disebut *raden ayu*, sedangkan istri atau perempuan *masagus* dipanggil *masayu*.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Sevenhoven, *op.cit*, hal 36

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal 26

Sedangkan masyarakatan kebanyakan dibagi dalam tiga golongan, yakni: golongan *kiai-mas*, *kiai-agus* dan rakyat jelata. *Kiai-mas* adalah laki-laki dari perkawinan seorang masayu dengan laki-laki dari rakyat biasa, sedangkan *Kiai-agus* adalah anak laki-laki dari keturunan raden yang kawin dengan rakyat biasa. Untuk kalangan rakyat kebanyakan dibedakan atas orang *Miji*, orang *Senan* dan orang-orang yang menggadaikan diri atau budak<sup>56</sup>

Selain penduduk pribumi pada masa Kesultanan Palembang telah tinggal orang-orang Cina dan Arab. Biasanya orang Cina tinggal di sungai-sungai dengan rumah rakitnya, sedangkan orang Arab telah mengelompok. Kedua golongan itu bergerak sebagai pedagang perantara. Tidak ada angka pasti berapa jumlah orang Cina dan Arab yang bermukim di Palembang pada masa kesultanan ini. Namun menurut taksiran Sevenhoven jumlah orang Arab sekitar 500 jiwa dan orang Cina 800 jiwa.<sup>57</sup>

Pada masa Kesultanan Palembang baik orang Cina maupun orang Arab berperan sebagai pedagang perantara. Orang Cina biasanya berdagang barang pecah-belah, sutera kasar, benang emas, panci panci besi, obat obatan, teh, manisan dan barang barang Cina lainnya. Orang orang pribumi biasanya memperdagangkan hasil-hasil pertanian dan hutan seperti rotan, damar, lilin dan sebagainya. Dalam berdagang biasanya mereka menggunakan perahu yang disebut *wangkang*, yang mirip dengan kapal atau *jung* Cina hanya ukurannya lebih kecil.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*,

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal 33

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 47.



**Gambar. 8**  
**Perahu Jung (Wangkang) Cina**  
**(Sumber: Pemda Sumsel )**

Ada semacam perlakuan berbeda yang dilakukan pihak Kesultanan Palembang terhadap orang-orang Cina pada masa ini. Orang-orang Cina tidak diperbolehkan memiliki lahan pertanian, mereka diperkenankan tinggal di kota Palembang. Akan tetapi, mereka harus tinggal di atas perahu yang disebut rumah rakit di Sungai Musi. Kebijakan ini diambil oleh pihak Kesultanan Palembang dengan maksud untuk melindungi kepentingan kerajaan serta memudahkan mereka untuk mengendalikan orang-orang Cina, yang tinggal di rumah rakit, dengan cara membakar rumah rakit tersebut kalau dipandang keberadaan orang Cina membahayakan.<sup>59</sup>

Sedangkan terhadap orang Arab, pihak Kerajaan Palembang memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan pedagang Arab membangun gudang mereka di darat. Di lingkungan keraton Kesultanan Palembang, orang Arab juga mendapat perlakuan khusus, terutama yang baru datang dari Hadramaut. Perlakuan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 21.



istimewa tersebut erat kaitannya dengan kedudukan khusus orang Arab, yang dianggap lebih mumpuni dalam masalah agama. Orang Belanda yang pernah mengunjungi keraton Palembang menyaksikan, bahwa jika pembesar kerajaan menghadap raja, mereka harus menyembah sampai menyentuh lantai, sedangkan orang Arab boleh di kursi di sisi sultan, juga dalam segi hukum orang Arab juga hampir kebal.<sup>60</sup>

## B. Masa Kolonial Belanda

Sejak dihapuskannya Kesultanan Palembang pada tahun 1825 sebagai akibat kekalahan Sultan Mahmud Badaruddin II, maka kota Palembang statusnya berubah menjadi daerah karesidenan.<sup>61</sup> Karesidenan Palembang dibagi atas beberapa *afdeeling*, kecuali ibukota Palembang. Tiap-tiap *afdeeling* membawahi *onder-afdeeling* yang dipimpin oleh *controleur* dan tiap-tiap *onder-afdeeling* terdiri dari marga-marga yang diperintah oleh seorang kepala marga atau seiring disebut pasirah. Sedangkan ibukota Palembang sendiri dibagi dalam dua distrik yaitu Distrik Seberang Ulu dan Distrik Seberang Ilir.

Pada masa ini di wilayah Karesidenan Palembang terdapat 15 Distrik dan 40 *onder-distrik* yang masing-masing dikepalai oleh seorang Demang dan Asisten Demang, serta 174 marga yang terbagi dalam berbagai dusun dan kampung. Adapun pembagian *afdeeling* dan *onder-afdeeling* di Karesidenan Palembang adalah sebagai berikut<sup>62</sup>: 1) Daerah Ibukota Palembang terbagi dalam dua distrik, yaitu; Distrik

<sup>60</sup> Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo, Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, Jakarta : INIS, 1997, hal. 15

<sup>61</sup> Makmun Abdullah dkk, *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, Jakarta: Depdikbud, Ditjaranitra, 1984/1985. hal.49

<sup>62</sup> Ibid.,

Seberang Ilir dan Distrik Seberang Ulu, 2) *Afdeeling Palembang Ilir* atau (*Palembang Benendenlanden*) dengan ibu kotanya Sekayu, yang membawahi beberapa *onder-afdeeling*, yaitu: *Onder-afdeeling Musi Ilir* (Sekayu), *Onder-afdeeling Banyuasin* (Banyuasin dan talang Betutu), *Onder-afdeeling Rawas* (Surulangun) dan *Onder-afdeeling Ogan Ilir* (Tanjung Raja). 3) *Afdeeling Palembang Ulu* (*Palembangsche Bovenlanden*) ibukotanya Lahat, terbagi dalam beberapa *onder-afdeeling*, yaitu: *Onder-afdeeling Lematang Ulu* (Lahat), *Onder-afdeeling Lematang Ilir* (Muara Enim), *Onder-afdeeling Tanah Pasemah* (Pagar Alam), *Onder-afdeeling Tebing Tinggi* (Tebing Tinggi) dan *Onder-afdeeling Musi Ulu* (Muara Bliti). 4) *Afdeeling Ogan Ulu* dan *Komerling* dengan ibukota Baturaja, terbagi dalam beberapa *onder-afdeeling*, yaitu: *Onder-afdeeling Ogan Ulu* (Lubuk Batang), *Onder-afdeeling Komerling Ulu* (Martapura), *Onder-afdeeling Muara Dua* (Muara Dua) dan *Onder-afdeeling Komerling Ilir* (Kayu Agung).

Pada masa kolonial Belanda terjadi perubahan yang cukup dramatis, yakni sejak dimulainya penerapan kebijakan politik segregasi rasial yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan kolonial. Perubahan yang jelas tampak adalah terjadinya penggolongan masyarakat berdasarkan ras, dimana orang Barat ditempatkan sebagai golongan atas, orang Timur Asing seperti Cina dan Arab serta bangsa Asia lainnya, berada di lapis kedua Sedangkan mayoritas kelompok pribumi berada dalam strata sosial paling bawah.

Kondisi ini semakin kokoh dengan adanya pengelompokan pemukiman berdasarkan garis etnik tertentu. Sehingga di kota-kota besar di Indonesia pada masa kolonial seperti Batavia, Semarang termasuk pula Palembang dijumpai kampung-kampung berdasarkan kategori tersebut, seperti kampung Cina, Kampung Arab, Kampung Jawa, Kampung

Bugis dan Kampung etnik lainnya, yang mencerminkan pemisahan secara fisik.<sup>63</sup>

Klasifikasi sosial semakin kokoh dengan munculnya kebijakan ekonomi kolonial, yang melarang kelompok Timur Asing menjalankan usaha pertanian serta memiliki tanah, sementara di sisi lain mereka diberikan keleluasan peran sebagai mediator (pedagang perantara) yang menjembatani kepentingan pribumi dengan pemerintah kolonial.<sup>64</sup> Wertheim menyebut mereka dengan *minoritas dagang*<sup>65</sup>, terutama untuk minoritas Cina. Kebijakan pemerintah kolonial semakin jelas, dengan adanya ketentuan yang melarang orang Cina keluar dari pemukiman mereka secara bebas (*wijkenstelsel*).

Permulaan abad ke-20 dalam perspektif ekonomi dan politik kolonial Hindia Belanda dipandang sebagai puncak dari terwujudnya *Pax Nerlandica*.<sup>66</sup> Pasifikasi terhadap daerah-daerah di luar Jawa telah berakhir dan bersamaan dengan hal itu perkembangan ekonomi dan perdagangan daerah jajahan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari kebijakan politik ekonomi *neo-merkantilisme* kolonial Belanda sebagai akibat kemenangan kaum liberal di negeri Belanda pada akhir abad ke-19.<sup>67</sup>

<sup>63</sup> Berdasarkan fakta empirik dan pengamatan penulisan konsentrasi pemukiman keturunan Arab berada di Kampung 12 Ulu, 13 Ulu, 14 Ulu. Sedangkan keturunan Cina bisa ditemukan di Kampung 7 Ulu (Komplek Kapiten ) serta 10 Ulu tempat kelenteng tertua Soei Goeat Kiong.

<sup>64</sup> Liem Twan Djie, *Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa, Suatu Studi Ekonomi*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.

<sup>65</sup> W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia Dalam Masa Transisi, Studi Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

<sup>66</sup> *Pax Nerlandica* adalah keadaan aman dan makmur untuk semua wilayah kerajaan Belanda dibawah naungan kekuasaan pemerintahan kerjaan Belanda. Untuk jelasnya baca Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993, 37-38

<sup>67</sup> *Ibid.*,

Palembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dalam konteks kepentingan ekonomi kolonial dianggap sebagai salah satu kawasan *wingewesten* (daerah-untung) diluar pulau Jawa. Sebab Palembang pada masa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara pesat, yang ditandai dengan terbukanya Palembang sebagai kawasan eksploitasi kolonial, yakni terbukanya daerah ini bagi perkebunan (tembakau, kopi dan karet) serta mulai dilakukannya eksplorasi di bidang pertambangan (minyak bumi dan batu bara).<sup>68</sup>

Sebelumnya Palembang bukanlah daerah tujuan investasi para pengusaha perkebunan (*planters*), sejauh ini minat dan prioritas mereka untuk menanamkan modalnya disektor perkebunan hanya ditujukan di wilayah Sumatera Timur. Meskipun begitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi perkebunan Palembang pada masa ini, kondisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya di pulau Sumatera. Kondisi menarik kaum kapitalis Barat yang memandang kawasan ini sebagai daerah yang memiliki prospek ekonomi kedepan. Laju perkembangan ekonomi perkebunan semakin menarik perhatian kaum kapitalis Barat, apalagi sejak dilakukannya reorganisasi administratif pemerintahan pada tahun 1912-1913, yang mempermudah proses konsesi tanah *erpacht*.<sup>69</sup> Pembukaan usaha perkebunan yang pada awalnya dibuka di daerah dataran tinggi Pasemah pada tahun 1887 dengan jumlah 21

---

<sup>68</sup> Mestika Z, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003, hal 67

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal 69. Sistem *erpacht* adalah sistem sewa tanah dengan jangka waktu penggunaan selama 75 tahun. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah kolonial untuk melindungi tanah milik kaum pribumi dari serbuan pemodal asing yang ingin menanamkan kapitalnya untuk membuka usaha pembukaan.

perkebunan, maka sejak adanya reorganisasi administrasi meningkat menjadi 51 perkebunan pada tahun 1916.<sup>70</sup>

Awal abad ke-20 dalam perspektif kepentingan kolonial Belanda merupakan perodesasi bagi munculnya kapitalisasi Barat merambah ke daerah Palembang. Pada masa ini berkembang cabang-cabang perusahaan Barat yang beroperasi di Palembang, seperti *Borsumij* (eksportir karet), *Escumto* (importer barang-barang mewah), *Jacobson v.d. Berg* (tekstil) dan *Hagemijer* (makanan dan minuman).

Pada masa ini ini kelompok pedagang Cina lebih banyak menguasai bisnis transportasi, terutama transportasi air (perkapalan). Dalam bidang setidaknya tercatat nama besar perusahaan *Tiong Hoa Sing Loen Choen Kongsi*, yang melayani rute domestik sampai manca Negara. Selain sector transportasi para pedagang Cina juga memiliki perusahaan besar di pabrik pengolahan karet, seperti *NV. Palembang Rubber*. Jaringan bisnis Cina dalam perdagangan karet mulai dari hilir sampai ke hulu, yakni dari para tengkulak sampai ke pedagang besar (konglomerat). Kemudian lingkup jaringan usahanya mulai bergerak dari lingkup pedusunan Palembang sampai ke pasar global, seperti ke Singapura, Bombang, Shanghai dan Hongkong.

Perananan ekonomi kelompok Arab pada masa kolonial Belanda berkurang bila dibandingkan pada periode sebelumnya. Larangan pemerintah kolonial Belanda yang melarang mereka berdagang sampai ke pedalaman. Sehingga praktis posisi mereka digantikan oleh orang Cina, larangan semacam ini mungkin sebagai upaya Belanda mengurangi kekhawatiran mereka terhadap peran pengaruh ideologi-keagamaan orang Arab atas masyarakat lokal.

Sampai dengan tahun 1920-an, hanya terdapat dua perusahaan milik kelompok keturunan Arab yang masih

---

<sup>70</sup> *Ibid.*,

bertahan di Palembang, yakni *Firma Assegaf* dan *Firma Alimoenar*. Kedua perusahaan ini bergerak dalam distributor bahan-bahan bangunan, terutama kayu untuk kebutuhan perusahaan kayu di kota Palembang serta memenuhi permintaan kayu perusahaan milik orang Eropa yang beroperasi di daerah pedalaman. Mereka juga mengirimkan kayu ke negara-negara Timur Tengah melalui KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij-Perusahaan Pelayaran Belanda*). Ada dua nama, yang cukup diperhitungkan pada masa ini, yakni Said Alwi Sheik Assegaf serta Syekh Shabab. Assegaf merupakan pengusaha keturunan Arab di Palembang yang sukses mengelola usaha penggilingan padi, pabrik es dan perkayuan. Sedangkan Shabab merupakan seorang arsitek yang terkenal pada masanya, dialah yang merancang pembangunan Pasar 16 Ilir dan pemukiman Belanda di daerah Talang Semut Palembang.<sup>71</sup>

Di kalangan pedagang pribumi ada beberapa pedagang pengusaha yang cukup sukses seperti H.M. Akil (firma Haji Akil) dan H. Anang (firma H. Anang). Selain kedua tokoh diatas masih ada beberapa pribumi yang cukup menonjol baik secara perorangan maupun dalam bentuk firma. Pengusaha pribumi lain yang cukup punya nama di Palembang adalah H. Asya'ri seorang pedagang sekaligus pemborong bangunan dan Haji Ali pedagang karet di seberang I Ulu serta Haji Jamaludin dengan perusahaannya firma Toko Bali.

Mendekati tahun 1930-an, Palembang sebagaimana daerah lainnya didunia, juga mengalami *malaise* ekonomi. Dimana harga karet di pasar internasional turun drastis, sebagai akibat berkurangnya permintaan pasar. Akibatnya perusahaan barat yang beroperasi di Palembang menjadi bangkrut seperti *Borsumij*. Akan halnya karet pribumi, meskipun sempat mengalami penurunan, berkat adanya

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, 101-102.

kebijakan kupon karet, yang bertujuan membantu mengatur harga karet di tingkat pasar, maka para petani karet rakyat bisa bertahan dari krisis ini.

### C. Masa Pendudukan Singkat Jepang

Masa singkat pendudukan bala tentara Dai Nippon seringkali dikatakan sebagai orde penuh ketidakpastian. Akan tetapi pada saat bersamaan dipandang pula sebagai tumbuhnya bibit nasionalisme. Masyarakat awam acap kali menilai bahwa periode 3,5 tahun penjajahan Jepang menimbulkan kesengsaraan yang lebih besar ketimbang penjajahan Belanda. Diatas itu semua lahirnya *nation state* yang bernama Indonesia tidak terlepas dari pemimpin-pemimpin pribumi seperti Soekarno dan Hatta serta pemimpin nasionalis lainnya yang pernah dan mau berkompromi dengan pemerintah pendudukan Jepang.

Dalam perspektif strategi politik-militer Jepang di Sumatera, Palembang menempati posisi yang istimewa. Ini terlihat dari cetak biru invasi Jepang ke *Nanyo* ("Kawasan Selatan"), kawasan Asia Tenggara sekarang. Sumatera bersama Semenanjung Malaya dimasukan ke dalam daerah inti (*nuclear zone*) di kawasan selatan. Artinya kedua daerah ini menjadi prioritas invasi Jepang ke wilayah *Nanyo*. Selain karena letaknya strategis dalam konteks kepentingan politik regional Jepang di kawasan ini, juga karena daerah ini kaya akan sumber daya alam yang dapat mendukung kepentingan ekonomi perang Jepang. Sebagai bukti terlihat dari pernyataan Admiral Nakamura, seorang perwira Jepang yang pernah bertugas di Sumatera bahwa "mundur dari Sumatera berarti kehilangan Hindia Belanda secara keseluruhan".

Pandangan ini tentunya secara tidak langsung mengurangi peran Jawa sebagai jantung kolonial Belanda.<sup>72</sup>

Posisi Palembang sangat vital bagi pemerintahan Dai Nippon dengan kekayaan sumber daya alam yang dihasilkannya, seperti minyak bumi, batu bara, timah dan karet. Palembang memiliki posisi yang strategis dalam konteks militer maupun ekonomi. Secara militer, penguasaan terhadap Palembang, memiliki nilai strategis bagi Jepang, yakni mereka mendapatkan basis pertahanan yang kuat dan pijakan yang kukuh untuk mengawasi lalu lintas pergerakan pasukan sekutu yang akan mundur dari Sumatera ke Jawa atau gerak masuk bala bantuan Sekutu dari daerah-daerah di sekitar Sumatera, Singapura dan Jawa dapat dicegah.

Penyerbuan bala tentara Jepang ke Palembang bersamaan dengan penyerbuan Jepang ke Singapura pada tanggal 12 Februari 1942. Kubu pertahanan pasukan Sekutu (Belanda) di Palembang tampaknya tidak siap mengantisipasi serbuan mendadak tentara Jepang. Setelah pulau Bangka berhasil diduduki oleh bala tentara Jepang pada malam hari tanggal 12 Februari 1942. Maka berselang dua hari kemudian tentara pendudukan Jepang sudah berhasil menguasai kota Palembang.

Keadaan Palembang pada awal-awal pendudukan tentara Jepang sebagaimana tergambar dalam kutipan dibawah ini:

"Pukul setengah sembilan pagi tanggal 14 Februari 1942 balatentara Jepang mulai memasuki pinggir kota. Suara serine meraung-raung ditimpali rentetan tembakan mitraliur Jepang. Orang-orang kampung terlihat bingung dan pasrah. Pegawai dan pejabat-pejabat Belanda sibuk membakar berbagai dokumen dan arsip. Tangki-tangki minyak yang berada didalam

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, hal. 227-228.



kota diledakan. Bangunan-bangunan yang dianggap penting dibakar. Kota Palembang untuk beberapa saat diselimuti awan mendung dan tabir asap hitam. Kota yang menurut sensus penduduk tahun 1930 sekitar 110.000 orang itu semakin penuh sesak dijejali ribuan pengungsi sipil maupun militer yang mengalir dari utara. Diantara pengungsi termasuk mereka yang menyelamatkan diri dari Singapura yang datang sejak bulan-bulan terakhir menjelang perang Dunia ke-2. juga terlihat pengungsi dari Australia, Inggris, Inggris-India dan Cina.”<sup>73</sup>

Wilayah Palembang bersama daerah Semenanjung Malaya berada dibawah penguasaan Brigade Tentara (*Riku Gun*) ke-25 yang berpusat di Singapura dengan Letnan Jendral Sakuno Todayoshi sebagai pemimpin divisi ke-38 yang bertugas menduduki Palembang. Sedangkan Jawa berada dibawah kontrol Brigade Tentara (*Riku Gun*) ke-16 yang berkedudukan di Batavia. Untuk wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat dibawah kontrol Angkatan Laut (*Kai Gun*) yang berpusat di Makasar.<sup>74</sup>

Dalam pandangan politik Jepang, wilayah pulau Sumatera memiliki “keunikan” tertentu dibandingkan dengan Jawa. Keunikan menyangkut perbedaan internal diantara masing-masing daerah administratif di Sumatera. Dengan dasar ini pemerintahan pendudukan Jepang memberlakukan administrasi pemerintahan militer pada bulan September 1942. Perubahan yang tampak jelas adalah bahwa pemerintahan teritorial Sumatera tidak lagi menjadi subordinasi Jawa sebagaimana model pemerintahan Hindia Belanda.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 230.

<sup>74</sup> Makmun Abdullah, *op.cit*, hal. 55.

Pemisahan administrasi pemerintahan Sumatera dari Jawa dan penggabungan daerah dengan Semenanjung Malaya memiliki landasan jelas yang mencerminkan visi Jepang mengenai peranan penting kedua wilayah ini. Bagi Jepang Sumatera adalah "daerah inti", kehilangan pulau ini berarti hilangnya kedudukan mereka di Indonesia. Secara ekonomi daerah Palembang menyediakan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, karet, batu bara serta timah yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan perang Jepang. Dari sisi militer, daerah ini merupakan kawasan yang strategis gerak pasukan lawan (Sekutu) yang keluar-masuk ke Selat Malaka, sedangkan pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk padat dan menghasilkan beras dengan jumlah yang cukup melimpah dimanfaatkan oleh Jepang sebagai sumber pangan dan tenaga kerja paksa untuk proyek-proyek Jepang di dalam dan di luar pulau ini.

Pemisahan antara Sumatera dan Jawa oleh Jepang, juga didasari oleh pertimbangan lain, seperti pertimbangan kondisi politik diantara kedua wilayah tersebut diatas. Setidaknya dalam pandangan Jepang sebagaimana tercermin dalam laporan Jepang yang menyebutkan bahwa nasionalisme dan kegiatan pergerakan di Sumatera relatif kurang berkembang dibanding Jawa. Hal ini tampak dari adanya pelarangan pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pengungkapan semangat "kemerdekaan" yang semula diperbolehkan oleh pemerintah militer Jepang.

Jepang melakukan penyusunan administrasi pemerintahan militer secara permanen di Sumatera sejak bulan September 1942. Jumlah personel Jepang yang terlibat dalam pemerintahan, baik sipil maupun militer kurang lebih 75.000 orang. Sesuai dengan kepentingan perang mereka, penguasa tidak terlalu membangun birokrasi rumit sebagaimana pemerintah Hindia Belanda. Bahkan pemerintah

Jepang masih mempertahankan struktur hierarki kekuasaan warisan administrasi pemerintahan Hindia Belanda, tapi dengan istilah bahasa Jepang, seperti untuk pulau Sumatera, dibagi kedalam 10 Karesidenan (*shu*), yang dikepalai oleh seorang *chokan* (residen).

Daerah setingkat *afdeeling* dan distrik pada masa pemerintahan Hindia Belanda dipimpin oleh *bunshu-co* dan *fuku-bunshu* (setingkat *onder-afdeeling*) yang dikepalai oleh *fuku-bunshu-co* serta pejabat setingkat *controlir* (*sonco*) yang semula banyak dijabat oleh orang kulit putih pada masa Hindia Belanda diganti oleh pejabat bumi putra. Dalam konteks pejabat setingkat *sonco* dijabat oleh bekas Demang atau mantan Pasirah.<sup>75</sup> Hampir semua pejabat pribumi dipertahankan, namun tugas mereka sekarang adalah melayani kepentingan pemerintah pendudukan Jepang. Khusus untuk kota Palembang, Jepang menciptakan sebuah struktur organisasi-*tonarigumi*-rukun tetangga. Sebab kota Palembang sebagai *gemeente* tidak menganut sistem marga sebagaimana daerah lainnya di Sumatera Selatan. Status kampung yang dipimpin oleh sirih kampung (*ku co*) memiliki kedudukan sejajar dengan dengan *kerio*, sedangkan rukun tetangga parallel dengan punggawa (*kumi co*).<sup>76</sup>

Mulai bulan Mei 1943 Jepang memindahkan Markas Besar Tentara ke-25 yang berpusat di Singapura ke Bukittinggi, pemindahan ini memberikan petunjuk kuat adanya perubahan kebijakan perang di kawasan selatan. Jepang mencoba memberikan peluang yang lebih besar kepada pulau Sumatera untuk menghadapi serangan sekutu. Perubahan segera tampak adalah posisi dan kedudukan setiap *shu* terlihat "otonom". Mereka memiliki kewenangan untuk memecahkan persoalan internal mereka serta memenuhi kebutuhan ekonominya secara swasembada. Setiap *shu* di

---

<sup>75</sup> Mestika Zed, *op.cit*, hal. 235.

<sup>76</sup> Makmun Abdullah, *op.cit*, hal. 57.

masing-masing daerah model yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Penerapan kebijakan yang terkesan seperti "politik isolasi" secara tidak langsung seperti model politik "divide et empera" kolonial Belanda.<sup>77</sup>

Dalam konteks dinamika politik internal Sumatera, Jepang memiliki pandangan bahwa kelompok etnik Minangkabau dan Aceh memiliki kemampuan dan kecerdasan politik serta partisipasi politik yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya dibagian pulau Sumatera. Jauh sebelum invansi Jepang ke wilayah ini. Mereka telah menjalin kontak dengan organisasi PUSA (Aceh) serta Gerindo di Sumatera Barat dan Timur. Sedangkan untuk Palembang lebih diprioritaskan untuk kepentingan ekonomi perang Jepang.

Pemerintah berusaha menarik simpati masyarakat pribumi dengan memfasilitasi pembentukan organisasi politik maupun semi-militer seperti *Shu Sangi Kai* (semacam Dewan Penasehat Daerah) yang kemudian diperluas lewat organisasi *Palembang Hokokai* serta *Giyugun* dan *Heiho* untuk militer. *Shu Sangi Kai* mirip dengan *Palembangraad* ciptaan Belanda yang sepenuhnya dipegang oleh pribumi, sedangkan untuk *Shu Sangi Kai* dipegang langsung oleh Letnan Jendral H. Kasai, Gubernur Militer di Jepang.

Kapitulasi pendudukan Jepang di Indonesia termasuk di Palembang mulai memperlihatkan kemunduran pada periode akhir perang Asia Timur Raya. Sinyal mulai terjadinya kemunduran tentara pendudukan Jepang di Palembang, terlihat dari melunaknya sikap Jepang terhadap pemimpin pergerakan terlebih sejak disiarkannya pidato Perdana Menteri Koiso didepan parlemen Jepang pada 7 September 1944 dengan salah satu isinya akan memberi kemerdekaan pada waktu yang akan datang. Bahkan untuk mempertegas keinginan untuk mendapatkan serta menagih janji pemerintah para

---

<sup>77</sup> Mestika Zed, *loc.cit.*,

anggota *Shu Sangi Kai*, seperti A.K. Gani (wakil ketua *Shu Sangi Kai*) , Ir Ibrohim (wakil *Shu Sangi Kai*), Abdul Rozak, K.H. Cik Wan dan Pangeran Cik Mat wakil dari Palembang bertemu di Bukittinggi pada tanggal 26 Juni 1945. Dalam forum tersebut mereka juga bertemu dengan tokoh-tokoh Sumatera seperti M.Syafei (Sumatera Barat), Teuku Nyak Arif (Aceh). Mr Abas (Lampung) para pengurus dewan *Shu Sangi Kai* yang diangkat oleh Jepang. Ketakutan yang berlebihan dari pihak Jepang erhadap kaum pergerakan juga terlihat pembatasan mereka terhadap kaum pergerakan untuk akses informasi seperti adanya sensor ketat terhadap pemberitaan yang berasal dari Kantor Berita Domei di Palembang.

Bagi masyarakat keturunan Cina kedatangan Jepang telah mereka antisipasi, bahkan ada beberapa pengusaha yang menawarkan tenaga mereka untuk pemerintahan baru. Tidak seperti di Malaysia yang memunculkan gerakan perlawanan bersenjata seperti Malayan People's Anti Japanese Army (MPAJA) serta organisasi bawah tanah anti Jepang seperti Fuxing She (Asosiasi Resiliensi) bentukan KMT dan Jizhong She (Asosiasi Sentralisasi) di Jawa yang beranggotakan lebih dari 100 orang secara cepat dibasmi oleh tentara pendudukan Jepang. Persatuan anti Fasis yang dibentuk Wang Renshu secara cepat dapat dibungkam oleh Jepang. Penerimaan secara pasif keturunan Cina terhadap kedatangan Jepang akan berimplikasi pada kedudukan mereka kemudian. Tidak lama setelah Hindia Belanda berhasil ditaklukan oleh Jepang keluar perintah untuk mengawasi secara ketat kelompok keturunan Cina. Bahkan jauh sebelum invasi Jepang ke Hindia Belanda, pemerintah pendudukan Jepang telah mengawasi kelompok etnik Cina. Organisasi politik kelompok Cina Totok maupun Cina Peranakan seperti KMT(Kuo Min Tang) dan CHH (Chung Hua Hui, Asosiasi Orang-Orang Cina), serta merta menjadi organisasi politik terlarang pada periode ini. Banyak terjadi penangkapan

terhadap orang-orang keturunan Cina yang didalamnya termasuk elite dari organisasi KMT dan CHH.<sup>78</sup>

Secara psikologis penahanan dan penangkapan yang dilakukan terhadap warga keturunan Cina menyebabkan sebagian dari mereka mengundurkan diri dari aktifitas perdagangan. Bahkan ada perlakuan diskriminatif yang membuat posisi orang Cina menjadi sulit, terutama bagi mereka yang telah menikah dengan orang Belanda, setidaknya mereka dianggap musuh oleh Jepang. Dan yang pasti proses Eropanisasi terhadap warga keturunan Cina di Hindia Belanda menjadi berhenti

Periode pendudukan Jepang oleh sebagian Sinolog kita, seperti Didi Kwartananda sebagai proses "pencinaan kembali" atau dengan bahasa politis yang lebih lugas telah terjadi proses sosialisasi nilai ketionghoan mereka melalui media pendidikan merujuk pada kasus yang terjadi di kota Yogyakarta.<sup>79</sup> Berdasarkan kebijakan dasar Jepang di bidang pendidikan tercantum suatu dokumen berjudul 'Kebijakan Fundamental mengenai Pendidikan di Wilayah Selatan', yang dibuat oleh Markas Besar Balatentara Ekspedisi Selatan, tertanggal 12 Januari 1942. Dari dokumen diketahui bahwa pada awalnya Jepang sama sekali berniat menghapuskan sekolah-sekolah Tionghoa, namun bahasa Tionghoa diperkenankan untuk diajarkan sebagai kurikulum ekstra. Sejauh ini belum ada penelitian dan fakta empirik terjadinya proses resinifikasi untuk kasus Palembang.

---

<sup>78</sup> Twan Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*, terjemahan Apri danarto, Yogyakarta: Niagara, 2005, hal. 90-91.

<sup>79</sup> Didi Kwartananda, *Lahirnya Satu Generasi Baru Tionghoa di Jawa: Pendidikan dan Resinifikasi di Yogyakarta 1930-an s/d 1950-an*, makalah pada Konferensi dan Workshop Internasional "Dekolonisasi dan Posisi Etnis Tionghoa Indonesia 1930-an s/d 1960-an", diselenggarakan oleh Jurusan

Pendudukan Jepang di Indonesia juga bisa dimaknai sebagai bangkrutnya kelompok pedagang Cina yang bermitra dengan kapitalis Belanda. Sebab pada periode ini tidak sedikit perusahaan dan firma milik warga keturunan Cina yang gulung tikar akibat kebijakan ekonomi pemerintah pendudukan Jepang yang menyukai mereka (pedagang Cina) yang berhubungan dengan sekutu. Selama periode awal masa penjajahan, sikap Angkatan Darat Jepang terhadap warga Cina tampaknya telah berpengaruh pada posisi dagang mereka. Jenderal Yamamoto yang pada awal Maret 1942 menjabat sebagai *gunseikan* (panglima militer) di Jawa, berkata pada pemuka masyarakat Cina bahwa masyarakat Cina tampak 'hormat dan patuh dari luar, tetapi tidak dari dalam'. Pernyataan yang tak kalah tegasnya dinyatakan S. Nishijima "Loyalitas warga Cina diterima secara skeptis, dan pihak penguasa menunjukkan sikap negatif terhadap eksistensi kalangan pengusaha Cina".<sup>80</sup>

#### D. Masa Kemerdekaan

Ilustrasi menarik bagaimana respon masyarakat Palembang ketika mendengar berita proklamasi seperti tergambar pada kutipan dibawah ini:

"Ruang tamu rumah jalan Kepandean 28 Palembang , malam hari sekitar pukul 20.00 malam berkumpul beberapa tokoh perjuangan dan pemuda. Rumah tinggal tersebut tidak lain kediaman Dr. A.K. Gani, seorang tokoh pergerakan, kiranya mereka berkumpul untuk membahas kebenaran terhadap desas-desus bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi telah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hata. Sebagian yang hadir tampak was-was dan seribu satu pertanyaan tentang langkah – langkah

---

<sup>80</sup>Twan Peck Yang, *op.cit.*, hal. 96.

yang harus dilakukan jika kabar baik benar-benar suatu kenyataan.”<sup>81</sup>

Proklamasi sebagai jembatan emas menuju kepada terwujudnya masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pernyataan ini paling tidak menggambarkan betapa proklamasi menyiratkan secercah harapan akan lahirnya pemerintah yang akan mengentaskan penduduk Indonesia dari penindasan kaum kolonial. Malam itu tanggal 18 Agustus 1945 sejumlah pemuka masyarakat Sumatera bagian Selatan hadir di kediaman A. K. Gani seperti Nungtjik A.R, A.M. Thalib, dr. M.Isa, Ir. Ibrahim, Asaari, Abdul Rozak, Komisaris Polisi Moersod, K.H. Tjikwan , R.Z. Fanani dan beberapa tokoh pejuang lainnya yang usianya dipandang senior.

Tak ketinggalan hadir dari golongan muda seperti Maelan, orang pertama yang mendengar berita Proklamasi dari meja tugasnya sebagai operator/redaktur Domei Palembang. Dan Maelan pulalah yang membacakan teks proklamasi untuk pertama kalinya di Palembang. Anak muda lainnya yang hadir selain Maelan adalah Mas'ud Bakaruddin, Zaelani, abi hasan said, Amantjik, Habibullah Azhary dan Sholeh.

Terlambatnya informasi mengenai berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di Palembang disebabkan oleh beberapa faktor yakni:

- Sukarnya komunikasi dan transportasi melalui laut, darat dan udara antara kota Jakarta- Palembang.

Hubungan radio dipersulit, karena semua pesawat radio milik rakyat disegel oleh pemerintah Jepang setempat tanpa perkecualian.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Abi Hasan Said, *Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah, Perjuangan Rakyat Semesta Menegakkan Republik Indonesia di Ujung Selatan Sumatera*, (ed) M. Uteh Riza Yahya, Jakarta: Yayasan Krama Yudha, 1992, hal. 73.



Berbicara mengenai respon masyarakat Palembang terhadap berita proklamasi, tidak bisa dilepaskan dari peran penting seorang A.K. Gani, tokoh pergerakan yang memiliki kemampuan diberbagai bidang dari kedokteran, politik, ekonomi sampai ke film. Gani menyatakan secara tegas apa artinya proklamasi sebagai pernyataannya kepada para pemuda yang hadir pada pertemuan malam itu. Berikut ini petikan suasana dialog malam itu;

Beliau berkata “Tahukah kalian apa arti Proklamasi?”, pertanyaan itu seperti tak pernah pupus dari ingatan seorang pemuda bernama Abi Hasan, yang memberanikan menjawab pertanyaan Gani, “Proklamasi artinya pernyataan dalam bahasa Inggris disebut *Proclamation*.” “Kamu betul”, ujar Gani sambil sedikit mengganggu. “Tetapi perihal proklamasi kemerdekaan, arti dan maknanya tidaklah sesederhana itu.” Ia kelihatan akan meneruskan kata-katanya itu sambil menarik nafas yang mengatur sikap. Para pemuda yang setiap waktu bisa bertemu dan berdialog dengan tokoh nasional ini tidak menyia-nyaiakan kesempatan berharga itu untuk memasang perhatian seksama. “Proklamasi memiliki makna yang lebih luas, ia memiliki makna politik dan ketatanegaraan. Dia mempunyai konsekuensi-konsekuensi dan jangkauan yang jauh. Buat kita, supaya kalian mengerti, proklamasi kemerdekaan itu telah melahirkan kewajiban. Kewajiban untuk memberinya isi. Dan karena ini kita sekarang telah dihadapkan pada tantangan kecil dan besar. Pekerjaan yang kita hadapi harus segera mewujudkan satu

---

<sup>82</sup> Makmun Abdullah, *Serangan Bakas Prabumulih 1947*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1996, hal. 20. Pendapat senada diungkapkan oleh Bp. H.A. Zawawie Said, seorang veteran perang kemerdekaan yang saat ini menjabat sebagai ketua Legiun Veteran Republik Indonesia cabang Kota Palembang, wawancara tanggal 27 Maret 2007.

bentuk organisasi untuk menghimpun kekuatan yang ada dalam masyarakat sehingga pada saat kekuatan itu diperlukan dapat kita benturkan pada setiap penghalang dan perusak bangunan negara yang akan kita wujudkan, sebagai mana dinyatakan dalam teks proklamasi yang tadi sama-sama kita dengar.”<sup>83</sup>

Tanggal 19 Agustus 1945 dilaksanakan pertemuan kedua di rumah Gani, tamu-tamu yang hadir jumlahnya lebih banyak. Selain tokoh masyarakat yang hadir, pertemuan ini juga dihadiri oleh para tokoh yang menjabat sebagai pemimpin organisasi buruh minyak (Salam Paiman), Parmono (Djawatan Kereta Api), R.M. Oetojo (Pos Telepon dan Telegraf), Agus Rachman dan Hanan. Sedangkan dari kelompok golongan muda, terlihat hadir seperti; M. Yunus Syamsuddin, Husin Achmad, Sualaiman Effendi, Chodewy Amin serta dari anggota *Gyugun* yakni Hasan Kasim, M. arief dan Dani Effendi. Dalam pertemuan ini, Gani lebih menekankan bagaimana langkah-langkah yang harus diambil dalam batas-batas tertentu dan rahasia, menyangkut proklamasi kemerdekaan.

Tiga hari setelah pertemuan kedua di rumah Gani, *Syu Tyiokan Myako Toshio*, pimpinan pemerintahan pendudukan bala tentara Jepang di Palembang, mengundang Badan Kebaktian rakyat Daerah Palembang atau *Palembang Shyu Sangikai* untuk hadir ke Talang Semut (kawas elit tempat tinggal pejabat dai Nippon). Undangan dari Jepang tentunya melahirkan berbagai interpretasi dan kecurigaan dari pihak kita, karena khawatir mereka akan ditangkap atau mungkin dihabisi. Meskipun begitu, para tokoh masyarakat Palembang memenuhi undangan pemerintahan Jepang, mereka mempersiapkan sebuah delegasi yang terdiri dari Abdul Rozak, Nuntjik AR, R. Hanan, Asaari, Ir. Ibrahim, Bay Salim, K.H. Tjikwan, Salam Paiman dan Parmono. Sedangkan Gani,

---

<sup>83</sup> Abi Hasan Said, *op.cit.*, hal. 74-75.

sengaja tidak diikuti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam pertemuan di kediaman *Tyio kan* yang dihadiri oleh stafnya Matsubara, Kepala Bagian Pemerintahan serta Polisi Rahasia Jepang (*Syomubutjo Tokkokatyo*). Inti dari pertemuan tersebut adalah pernyataan dari perwakilan Jepang di Palembang mengenai perintah penghentian perang oleh kaisar Hirohito serta meminta pemimpin rakyat Indonesia di Palembang dan pihak Jepang dapat menjaga keamanan dan ketertiban. Kemudian dirumuskan beberapa kesepakatan antara pihak Jepang dan pemimpin Indonesia di Palembang, yang isinya sebagai berikut:

- Soal keamanan, pihak Indonesia bersedia ikut memikul tanggung jawab sepenuhnya.
- Jepang harus menjamin keselamatan segenap pemimpin dan rakyat Indonesia, serta mereka (Jepang) tidak boleh bertindak apapun di luar pengetahuan pihak Indonesia.
- Masalah Indonesia merdeka adalah soal bangsa Indonesia sendiri dan tidak boleh dihalangi.<sup>84</sup>

Sebagai respon terhadap berita kekalahan Jepang dari sekutu, para pemimpin dan tokoh masyarakat di Palembang membentuk pemerintahan sipil di Palembang pada tanggal 22 Agustus 1945, yang dipimpin oleh Dr. A.K. Gani. Terbentuknya pemerintahan sipil di kota Palembang, diikuti pula munculnya organisasi yang anggotanya sebagian besar merupakan pemuda terpelajar yang memiliki motivasi untuk membangkitkan kesadaran baru tentang pentingnya persatuan pada awal kemerdekaan. Beberapa organisasi seperti Hizbul Wathan (Muhammadiyah), beberapa organisasi kepemudaan *onderbouw* Partai Politik seperti SIAP (PSII), Suryawirawan

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 76-77.

(Parindra) serta kelompok lainnya di bawah Indonesia Moeda dan Gerindo.

Selain organisasi diatas, pada awal revolusi di Palembang , ternyata masyarakat keturunan Cina di kota ini juga mengorganisasi barisan perjuangan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, yang diberi nama Persatuan Kaum Tani Tionghoa (PKTT). Atas prakarsa seorang pemuda bernama Theng A Suy, yang berasal dari keluarga petani. Organisasi ini berada langsung dibawah otoritas Gani. Kelompok ini di awal kemerdekaan terkenal dengan julukan "*The Great Smugler*". Organisasi berperan sebagai pemasok sayur mayor, beras, daging serta menyuplai perlengkapan telekomunikasi, obat-obatan serta keperluan yang dibutuhkan oleh Gani dkk di Palembang.

Setelah hilangnya Theng A Soey secara misterius, maka PKTT mengalami kemunduran serta perpecahan didalam internal mereka. Selain nama diatas, juga dikenal Theng Lian Joo atau dikenal dengan Tong Djoe, yang masih merupakan kerabat dari Theng A Soey. Pemuda berperan sebagai operator pelaksana penyelundupan dengan kapal laut antara Singapura-Palembang.<sup>85</sup>

Masa revolusi kemerdekaan merupakan periode transisi pemerintahan yang ditandai dengan ketiadaan tertib hukum serta ketidakpastian bagi pelaku ekonomi, tak terkecuali bagi orang Cina yang mengendalikan perekonomian di Indonesia. Pada masa ini, orang Cina harus menghadapi dua penguasa yang saling berebut pengaruh baik secara politik maupun ekonomi, yakni antara pemerintah RI dan pemerintah Belanda.

Masa transisi dalam sebuah pemerintahan seringkali menimbulkan ketegangan sosial yang pada akhirnya bermuara kepada konflik antara pribumi dengan non pribumi

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 97.98.

(Cina), sebagaimana fenomena konflik SARA di beberapa wilayah Indonesia pada periode menjelang runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, khususnya di pulau Jawa (Jakarta dan Solo).

Paralel dengan kondisi Indonesia menjelang runtuhnya kekuasaan orde baru, masa revolusi di berbagai tempat di Indonesia juga diwarnai dengan munculnya aksi kekerasan anti Cina sebagaimana dipaparkan oleh Remco Raben. Beberapa kasus kekerasan seperti yang terjadi di Bagan Siapiapi pada bulan Maret-Oktober 1946, yang memakan korban di pihak orang Cina diperkirakan berjumlah 100-200 orang. Kemudian aksi yang sama yang terjadi di Tangerang pada bulan Mei 1946 diperkirakan tidak kurang 1085 orang Cina terbunuh sedangkan ribuan lainnya menjadi pengungsi ke Batavia. Masih pada wilayah yang sama, yakni dalam skope yang lebih luas (Jawa Barat) pada bulan Juli-Agustus 1947 terjadi tindakan serupa. Di beberapa wilayah seperti Cirebon dan Majalengka orang Cina yang menjadi korban kekerasan berjumlah ratusan.<sup>86</sup>

Tidak terkecuali di Palembang masa revolusi juga diwarnai dengan terjadinya tindak kekerasan terhadap orang Cina. Sejauh ini hanya yang sedikit tulisan yang mengeksplorasi persoalan ini, satu-satunya yang cukup otoritatif yang berbicara mengenai peristiwa ini, adalah tulisan Lindayanti.<sup>87</sup> Secara umum tipe kekerasan anti Cina di Indonesia pada masa revolusi, menurut Twang Peck Yang

---

<sup>86</sup> Remco Raben, *Anti-Chinese Violence in the Indonesian Revolution*, makalah di sampaikan dalam Konferensi dan Workshop Internasional, "Dekolonisasi dan Posisi Etnis Tionghoa Indonesia 1930-an s/d 1960-an, di selenggarakan oleh Jurusan FIS UNP-NIOD, Padang 18-21 Juni 2006.

<sup>87</sup> Lindayanti, "Komunitas Orang Cina di Palembang pada Awal Kemerdekaan Indonesia 1945-1950 dalam Ed Sedyawati dan Susanto Zuhdi (ed), *Arung Samudra, Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lapijan*, Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lemlit UI, 2001, hal. 421-433.

dapat dibagi menjadi tiga periode. Periode pertama dimulai tak lama setelah proklamasi kemerdekaan dan mereda setelah kedatangan tentara sekutu, yang diboncengi tentara Belanda, dua periode lainnya menyusul pada aksi militer Belanda I tahun 1947 dan agresi militer II tahun 1948.<sup>88</sup>

Ambivalensi sikap orang Cina di Palembang membuat kelompok-kelompok radikal revolusioner dalam tubuh Republik Indonesia kerap kali menuduh mereka sebagai “kaki tangan NICA”. Mereka menghadapi pilihan yang teramat sulit: mendukung sepenuhnya Republik atau menerima kembali Belanda. Sedangkan mayoritas Cina – Palembang yang tergabung dalam beberapa organisasi mencoba bersikap “netral” terhadap konflik Indonesia-Belanda.<sup>89</sup>

Sikap oportunis yang kadang diperlihatkan kelompok ini, tampak ketika mereka berusaha mencari perlindungan kepada pihak yang dianggap yang berkuasa. Kedatangan tentara sekutu juga mereka manfaatkan untuk tujuan ekonomi termasuk ketika peranan sekutu digantikan oleh tentara NICA. Transisi penarikan dan pemindahan sekutu selama kurang lebih setahun, mulai tanggal 22 Oktober 1945 sampai tanggal 9 November 1946, merupakan fase awal munculnya tindak kekerasan ini, terutama ketika saat itu Palembang terjerumus dalam pertempuran-pertempuran antara pihak tentara NICA dengan pejuang Republik, yang klimaknya terjadi pada tanggal 1 Januari 1947, yang dikenal sebagai pertempuran lima hari malam.

Pada peristiwa ini kebanyakan orang Cina yang menjadi korban, berdasarkan laporan konsul Cina di Palembang tercatat 250 orang terbunuh, 1000 orang terluka, 600 orang hilang dan 900 orang kehilangan tempat tinggal.

---

<sup>88</sup> Twang Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*, Yogyakarta: Niagara, 2005, hal. 187.

<sup>89</sup> Mestika Zed, *op.cit.* 497.

Dari jumlah tersebut diperkirakan 10 % menjadi korban serangan militer udara Belanda, sedangkan sebagian besar dibunuh oleh pasukan Hizbullah, Napindo dan PKI. Sedangkan kerugian harta benda ditaksir mencapai \$5 juta dan 3,3 juta diantaranya dirampok perusuh.<sup>90</sup>

Pertempuran tahun baru 1947 di Palembang tampaknya mampu mengubah sikap politik kelompok-kelompok Cina Palembang. Sebagian dari tokoh Cina-Palembang yang berhasil lolos dari pertempuran dan menyelamatkan diri ke Singapura, mereka segera membentuk sebuah perhimpunan yang dinamakan *Himpunan Persahabatan Cina Palembang* (HPCP). Sedangkan mayoritas Cina Palembang lebih memilih bersikap netral ditengah suasana ketidakpastian.<sup>91</sup>

Akan tetapi ada beberapa yang mulai secara terang-terangan mendukung pihak Republik seperti yang dilakukan oleh CLU (*Chinese Labour Union*). Mereka melakukan aksi protes kepada pihak Belanda serta menuntutnya untuk membayar ganti rugi atas nyawa dan harta orang Cina yang hilang pada peristiwa awal Januari 1947. Meskipun sebenarnya korban orang Cina lebih banyak yang disebabkan oleh pihak Republik. Pemimpin CLU ini adalah Liem Djie Lan, seorang Cina peranakan yang dilahirkan di Palembang. Ia bertindak mewakili Cina-Palembang mengadakan pertemuan pada awal Februari 1947 untuk menuntut Belanda, namun permintaannya ditolak Belanda.<sup>92</sup>

Banyaknya orang Cina yang menjadi korban pada peristiwa Januari 1947 di Palembang, melahirkan solidaritas dari masyarakat Cina perantauan yang ada di Singapura. Hal ini terlihat dari respon kelompok ini dengan diadakannya

---

<sup>90</sup> Lindayanti, *op.cit.*, hal. 426.

<sup>91</sup> Mestika Zed, *op.cit.*, hal. 498.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 499.

Pertemuan Umum Cina Perantauan. Pertemuan diketahui pula oleh Lee Kong Chaian (wakil kamar dagang Singapura), hasil perlu dibentuknya Asosiasi masyarakat perantauan yang berkedudukan di Singapura untuk menyelesaikan masalah peristiwa Palembang Januari 1947.

Namun pendirian *Pao Chiao Hui* (PCH) atau *Overseas Chinese Protection Association* tidak memuaskan, karena organisasi hanya memperlakukan perlindungan dalam hal perdagangan pada orang Cina terhadap serangan militer Belanda. PCH tidak pernah membicarakan permasalahan warga Cina yang menjadi korban peristiwa tersebut. Oleh sebab itu Tan Kah Kee dari Liga Demokrat mengirim telegram kepada Presiden Soekarno untuk menghentikan gerakan anti Cina di Palembang dan di daerah-daerah pedalaman.

Karena PCH dianggap tidak mampu menangani permasalahan Cina-Palembang, maka persoalan diambil Asosiasi Cina Perantauan di Nanyang (*Nan Chiao Tsung Hui*-NCTH), yang diketuai oleh Tan Kah Kee dengan anggotanya Lee Kong Chian dari SOIEA (*The Singapore Overseas Chinese Importers-Exporters Association*)<sup>93</sup> dan Wan Yuang Xing dari Palembang, yang juga merupakan salah satu dari 5 anggota pengawas Impor-Ekspor Sumatera yang didirikan oleh pemerintah Republik.

Insiden Palembang juga mendapat respon dari media massa milik komunitas Cina, terlihat dari banyaknya protes, seperti yang dilakukan oleh harian *Sin Po*, yang terbit di

<sup>93</sup> Lindayanti, *op.cit.*, hal. 427. SOIEA (*The Singapore Overseas Chinese Importers-Exporters Association*) di dirikan pada tanggal 15 Januari 1946, pendiri dan anggotanya bersala dari Cina\_Palembang, organisasi merupakan perkumpulan dagang Cina totok, anggotanya terdiri dari importer dan agen produk Indonesia, khususnya karet, tembakau, the dan gula. Bendharanya adalah seorang Cina Palembang pemilik usaha perkapalan Tay Hock Goan. Pada awalnya berdirinya mmeiliki anggota yang terdiri dari 100 pengusaha kemudian meningkat menjadi 239 anggota pada tahun berikutnya.



Batavia tanggal 24 Januari 1947. Atas nama pemerintah Cina menyampaikan protes keras terhadap penguasa Republik dan Belanda untuk menyelesaikan Palembang serta meminta hal itu tidak akan terjadi lagi. Suara protes juga datang dari harian *Thien Sung Yit Po*, surat kabar milik kelompok Kuomintang, *Nan Chiao Jit Pao* (Komunis). Media massa menyebarkan berita untuk memboikot perdagangan dengan Belanda.

Sikap protes terhadap kekerasan Cina-Palembang, juga dilakukan oleh organisasi *Hooc Ho*, organisasi pengusaha hotel yang ada di Singapura. Mereka menyerukan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda serta menolak menerima tamu yang turun dari kapal-kapal Belanda. Tindakan yang lebih konkret dilakukan oleh Asosiasi Cina Perantauan di Nanyang (*Nan Chiao Tsung Hui*-NCTH) yakni menuntut ke Belanda antara lain: pertama, pihak Belanda mengganti semua kapal dan kargo yang musnah, kedua memberi kompensasi sehubungan terjadinya penembakan terhadap seorang pelaut yang bernama Chuan Ah Kwang. Ketiga, menarik peraturan yang menghambat ekspor-impor, keempat, memberi kompensasi atas kerugian yang diderita orang Cina dan kelima, menyatakan permintaan maaf kepada orang Cina secara keseluruhan.<sup>94</sup>

Bila semua tuntutan diatas tidak dipenuhi oleh Belanda, maka pedagang Cina akan melakukan boikot perdagangan dengan Belanda. Setelah melalui perundingan yang berlangsung alot, maka pada bulan Maret 1947 Belanda menyetujui beberapa hal, yakni pertama, menyetujui kompensasi atas kerugian yang diderita, kedua bersedia meminta maaf kepada orang Cina serta menjamin tidak akan terulang kejadian serupa.

Pola perdagangan Cina di Palembang pada masa revolusi merupakan bentuk perdagangan gelap, yakni dalam

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 428.

bentuk aktifitas penyelundupan yang dilakukan oleh kelompok bisnis Cina selama periode ini. Twan Peck Yang mengkategorikan dalam dua jenis kegiatan perdagangan ini, pertama apa yang disebut dengan *dabangke*, yakni sekelompok pedagang kecil yang telah ada sebelumnya kemudian berkembang secara pesat pada masa pendudukan Jepang.

Perdagangan dalam tipe ini biasanya dikelola secara perorangan dan usahanya tidak terlalu besar. Meskipun skalanya kecil, barang-barang yang dijual memiliki harga jual yang tinggi seperti emas, permata dan opium. Operasi kelompok pedagang ini dilakukan pada daerah tertentu. Mereka melintasi jalan darat daerah perbatasan untuk menukar barang yang dimilikinya dengan para pelanggan di seberang. Yang kedua, tipe perdagangann *lianho* atau perusahaan perkongsian, model perusahaan telah beroperasi sejak sebelum perang dunia kedua, misalnya transportasi dengan nama Tiong Hoa Sing Loen Choen Kongsi, yang melayani rute domestik maupun manca negara. Tipe *dangbangke* merupakan ciri utama perdagangan penyelundupan yang beroperasi di Jawa.

Untuk jarak yang lebih dekat, para *dangbangke* akan memilih menuntun atau mengendarai sepeda selama berjam-jam membawa sepuluh kilogram berbagai macam barang, menghindari jalan-jalan utama untuk memperkecil kemungkinan dirampok. Kemudian untuk jarak yang lebih jauh mereka biasanya menggunakan kereta api.<sup>95</sup> Kegiatan perdagangan biasanya dijalankan oleh kalangan totok, misalanya taipan Liem Sioe Liong, ia merupakan tipe pedagang *dabangke* yang beropearsi antara Kudus-Semarang. Kedekatannya dengan kelompok Republik pada

---

<sup>95</sup> Twang Peck Yang, *op.cit.*, hal. 111-127, lihat juga Mestika Zed, *op.cit.*, hal 502-503

masa revolusi menjadikan usahanya berkembang hingga kita mengenalnya sebagai konglomerat pada masa orde baru.

Dalam konteks Palembang tipe perdagangan *dangbangke* juga dijalankan, para pedagang Cina dengan mitranya kaum Republik bekerjasama menerobos blokade ekonomi Belanda. Uniknya tipe perdagangan ini bertali-temali dengan perdagangan khas Palembang-*ngulo*- yang beroperasi di daerah ini, khususnya wilayah Pasemah. Bahkan pada masa agresi militer Belanda I tahun 1947, kegiatan perdagangan lintas-batas garis demarkasi Lahat-Pagar Alam dilewati oleh pedagang *ngulo*.

Sama halnya yang dilakukan oleh kelompok *dangbangke* di Jawa, para pedagang *ngulo* ini harus berjalan kaki berjam-jam karena jembatan yang menghubungkan ke pasar rusak akibat perang. Mereka membawa hasil bumi dari daerah pedalaman seperti kopi, beras, bawang merah, ternak dan lainnya serta menukarnya dengan barang-barang dagangan seperti minyak, sabun, rokok, garam, perkakas pertanian.<sup>96</sup>

Jangkauan pedagang *ngulo* tidak hanya terbatas di daerah Sumatera Selatan saja, bahkan mereka sampai ke Bengkulu dan Lampung. Mereka berani mengambil resiko karena rute perdagangan mereka bukan rute perdagangan konvensional. Sebab jalan yang mesti dilewati antara lain hutan-belukar dan terkadang memiliki resiko besar seperti serangan binatang buas yang masih berkeliaran. Selain itu, mereka juga harus berhadapan dengan petugas keamanan yang selalu siaga di daerah-daerah yang batas demarkasi. Para pedagang *ngulo* harus membayar semacam "pajak tol" sebanyak dua kali di setiap daerah perbatasan. Kemudian mereka juga diwajibkan membawa "surat pas jalan" setiap kali

---

<sup>96</sup> Mestika Zed, *op.cit.*, hal. 504.

hendak melewati pos jaga yang menghubungkan daerah-daerah perbatasan Onder Distrik Militer.

Kelompok pedagang *ngulo* yang bermodal besar pada umunya adalah orang Cina-Palembang. Mereka biasanya menyewa beberapa "kuli bujang" untuk memanggul barang dagangan mereka. Mereka biasanya memborong barang-barang keperluan sehari-hari dalam jumlah besar. Sebagai contoh seorang pedagang Cina pada September 1947 membeli beras dalam jumlah besar dari pasar Pagar Alam, padahal saat itu rakyat sedang dilanda kelaparan.

Prototipe pedagang Cina tipe *ngulo* seperti Oun Jong Huat, pedagang yang dilahirkan di Palembang pada tahun 1902, sudah memulai usahanya pada masa pendudukan Jepang. Usahanya berkembang pesat setelah ia ditunjuk sebagai distributor minyak Plaju dan Sungai Gerong oleh Jepang. Sebagian dari minyak bumi dipergunakan untuk kepentingan militer dan sebagian lagi dijual untuk konsumsi masyarakat sipil. Posisinya adalah sebagai distributor sampai saat sktor ini dikendalikan oleh pihak Republik. Singkatnya ia melayani kebutuhan pasokan minyak sesuai dengan kemauan penguasa.

Jumlah pedagang kecil seperti pedagang *ngulo*, jumlahnya lebih banyak ketimbang tipe *lianho* di Palembang. Kelompok bisnis *lianho* biasanya menjadikan Singapura sebagai pusat kegiatan bisnis mereka. Kegiatan perdagangan mereka biasanya diorganisasi oleh SOCIEA dan PCH. Tidak kurang dari 50 orang pengusaha tipe *lianho* yang terjun dalam perdagangan gelap di Sumatera-Jawa. Dari 50 orang tersebut sekitar 64 % berasal dari Cina Palembang sedangkan sisanya 36 % berasal dari Jawa.

Pedagang *lianho* memiliki armada kapal yang terkait dengan kegiatan perdagangan Singapura-Palembang. Perubahan penting dalam sarana transportasi kapal Cina Palembang baru dimulai sejak periode revolusi. Sebelum

perang dunia II, kapal yang mereka punyai hanya kapal jenis tongkang (berbobot 10-15 ton) dan kapal roda lambung (20-30 ton). Kapal-kapal ini merupakan milik pribadi dan bukan milik perkongsian. Hanya segelintir kapal milik perusahaan. Setelah Jepang kalah dari sekutu, armada kapal Jepang diambil oleh Republik yang kemudian dijual kepada Cina Palembang. Selain itu, mereka merupakan juga membeli kapal dari otoritas Inggris di Singapura.

Selain itu kelompok bisnis Cina yang sudah ada sejak sebelum perang dunia II NV *Hok Tong* (perusahaan eksportir karet). NV *Hok Tong* adalah satu perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh kelompok Cina peranakan. Kelompok usaha ini sebelumnya bergerak dalam operasional pabrik gula di pulau Jawa yang kemudian melebarkan sayap bisnisnya ke pengembangan bisnis karet di Palembang. Sementara kelompok usaha *Hong Tong* memiliki basis bisnis karet di Palembang dengan kendali bisnisnya di Singapura. Anak-anak cabang perusahaan karet *Hok Tong* yang tersebar hingga Jambi, Pontianak dan Banjarmasin ikut terlibat dalam kegiatan perdagangan gelap pada masa ini.

Beberapa orang Cina yang terlibat kemitraan dengan penguasa Republik di Palembang dalam kegiatan perdagangan gelap ini, antara lain Wan Yuangxing dan Chuan Ann alias Toeng Djoe. Wan Yaungxing, adalah seorang Cina Peranakan yang terampil menggabungkan bidang bisnis dengan politik yang notabene dikuasai oleh totok. Sedangkan Tong Djoe selain dikenal karena kedekatannya dengan Gani, kerabatnya yang dikenal sebagai aktivis perkumpulan Cina yang pro-Republik. Kedua orang ini memiliki kedekatan dengan Gani sejak masa pendudukan Jepang. Bahkan mereka juga berhubungan dengan Ibnu Sutowo yang kelak pernah menjadi orang penting di perusahaan perminyakan nasional.

## E. Masa Orde Lama sampai Masa Reformasi

Pada masa orde lama kebijakan yang secara membatasi ruang gerak pedagang Cina, terlihat jelas dengan dikeluarkannya PP No. 10 tahun 1959 yang membatasi perdagangan eceran keluar dari kota besar. Peraturan ini diberlakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan ekspansi usaha dagang milik orang Cina. Akibatnya terjadinya penyusutan terhadap skala usaha perdagangan Cina pada masa ini.<sup>97</sup>

Keluarnya peraturan tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan keluarnya UU Agraria tahun 1960, yang salah satu isinya membatasi kepemilikan tanah oleh orang asing. Puncak penderitaan bagi masyarakat keturunan Cina adalah terjadinya peristiwa G30S PKI tahun 1965, dimana mereka menjadi salah satu target bagi pelampiasan kemarahan penduduk pribumi, karena mereka dianggap menyokong kegiatan komunis di tanah air.

Memasuki pemerintahan orde baru, terjadi perubahan dimana orientasi pemerintah yang lebih mengutamakan pembangunan, maka ketidak stabilan politik serta untuk menjaga iklim investasi merupakan prioritas utama pemerintah orde baru. Maka untuk mengurangi ketegangan rasial antara pribumi dengan masyarakat keturunan Cina, pemerintah orde baru melarang segala sesuatu yang berbau Cina, seperti sekolah Cina dan bahasa Cina. Sehingga pada periode ini, praktis orang-orang Cina harus menyesuaikan dengan keinginan pemerintah orde baru, mereka menggunakan nama-nama Indonesia atau lokal sebagai cara aman dari tekanan pemerintah orde baru, termasuk di daerah Palembang.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Leo Suryadinata, *Dilemma Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Grafitipers, 1984, hal. 140-145.

<sup>98</sup> Ulasan mengenai hal ini bisa dibaca pada karya, Hari Purwanto, *Orang Cina Khek dari Singawang*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2005.

## **BAB IV**

### **ARSITEKTUR BANGUNAN (INDIS) DAN MOTIF KAIN SONGKET TRADISIONAL PALEMBANG SEBAGAI BENTUK AKULTURASI BUDAYA**

#### **A. Arsitektur Bangunan**

Arsitektur bangunan kolonial yang masih dapat kita temukan di di Kota Palembang, selain sebagian sumberdaya arkeologi untuk tujuan pengembangan objek wisata, juga mensymbolisasikan jejak-jejak perubahan sebuah masyarakat. Selain dari ragam arsitektur yang ada pada bangunan tersebut, bisa dilihat sejauh unsure perpaduan antar budaya menyatu. Dalam konteks ini istilah munculnya arsitektur *Indis* adalah merujuk kepada model bangunan dan ragam hias arsitektur yang ada didalamnya yang mencerminkan adanya interaksi serta akulturasi budaya yang termanifestasi dalam konsep dan bentuk bangunan yang bercorak perpaduan tersebut. Dengan merujuk pada studi yang dilakukan oleh arkeolog Balai Penelitian Arkeologi Palembang terkait potensi sumber daya arkeologi di sekitar Benteng Kuto Besak Palembang.<sup>99</sup>

Kawasan Benteng Kuto Besak dapat dikatakan menarik karena sampai saat ini pun kawasan tersebut tetap difungsikan sebagai pusat pemerintahan Kota Palembang. Secara geografis Kawasan Benteng Kuto Besak mempunyai batas-batas yang cukup jelas berupa sungai-sungai yang mengelilinginya, yaitu Sungai Musi, Sungai Sekanak, Sungai Kapuran, dan Sungai Tengkuruk. Meskipun Sungai Kapuran dan Sungai Tengkuruk saat ini sudah hilang, tetapi polanya masih dapat terlihat, yaitu Sungai Kapuran menjadi Jl Kapuran dan Sungai Tengkuruk menjadi Jl Sudirman.

---

<sup>99</sup> Novita Aryandini, *Sumberdaya Arkeologi di Sekitar Benteng Kuto Besak*, diakses dari [www.balarpalembang.go.id](http://www.balarpalembang.go.id), diakses tanggal 20 Januari 2009.

Beberapa bangunan yang berasal dari masa Kesultanan Palembang Darussalam dan Kolonial Hindia-Belanda sampai saat ini masih dapat ditemukan di kawasan tersebut, antara lain: Benteng Kuto Besak, Masjid Agung Palembang, Museum Sultan Mahmud Badaruddin II dan Kantor Walikota Palembang.

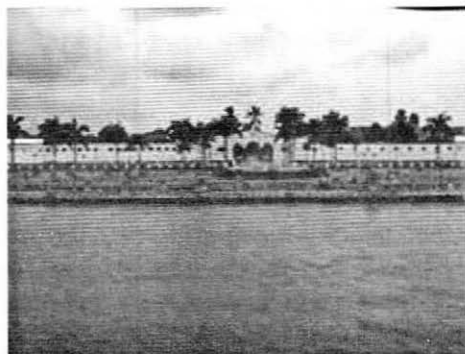
## **1. Benteng Kuto Besak**

Benteng Kuto Besak sebenarnya adalah keraton keempat dari Kesultanan Palembang. Pada awalnya keraton Kesultanan Palembang bernama Kuto Gawang dan terletak di lokasi yang sekarang dijadikan pabrik pupuk Sriwijaya. Tahun 1651, ketika Bangsa Belanda ingin memegang monopoli perdagangan di Palembang, keinginan tersebut ditentang oleh Sultan Palembang, sehingga terjadi perselisihan yang puncaknya adalah penyerbuan terhadap keraton tersebut. Penyerbuan yang disertai pembumihangusan tersebut menyebabkan dipindahkannya pusat pemerintahan ke daerah Beringinjanggut di tepi Sungai Tengkuruk, di sekitar Pasar 16 Ilir sekarang. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I (1724 -- 1758) pusat pemerintahan tersebut dipindahkan lagi ke lokasi yang sekarang menjadi lokasi Museum Sultan Mahmud Badaruddin II. Selanjutnya pusat pemerintahan berpindah lagi ke lokasi yang baru, yaitu yang sampai sekarang dikenal dengan nama Kuto Besak (Hanafiah 1989).

Secara keseluruhan Benteng Kuto Besak berdenah persegi panjang dan berukuran 288,75 m x 183,75 m, serta menghadap ke arah tenggara tepat di tepi Sungai Musi. Di tiap-tiap sudut benteng terdapat bastion, tiga bastion di sudut utara, timur dan selatan berbentuk trapesium sedangkan bastion sudut barat berbentuk segilima. Benteng Kuto Besak memiliki tiga pintu gerbang, yaitu di sisi timur laut dan barat laut serta gerbang utama di sisi tenggara.



Tembok keliling Benteng Kuto Besak sendiri juga mempunyai keunikan, yaitu bentuk dinding yang berbeda-beda pada masing-masing sisi benteng, demikian juga dengan tingginya. Dinding tembok sisi timur laut mempunyai ketebalan yang sama, ketinggian dinding tembok bagian depan adalah 12,39 m sedangkan bagian dalam 13,04 m, sehingga bagian atasnya membentuk bidang miring yang landai. Tampak muka dinding sisi timur laut ini juga dihiasai dengan profil. Sama dengan dinding sisi tenggara, dinding sisi timur laut juga dilengkapi dengan celah intai yang berbentuk persegi dengan bagian atas berbentuk melengkung. Lubang celah intai tersebut juga berbentuk mengecil di bagian tengahnya.



**Gambar 9.**  
**Benteng Kuto Besak di Palembang**  
(sumber: [www.balarpalembang.go.id](http://www.balarpalembang.go.id))

Dinding tembok sisi barat daya mempunyai dua bentuk yang berbeda. Secara umum tembok sisi barat daya ini dibagi dua karena di bagian tengahnya terdapat pintu gerbang. Dinding tembok sisi barat daya bagian selatan mempunyai bentuk dimana bagian bawahnya lebih tebal dari pada bagian atas, yaitu 1,95 m dan 1,25 m tetapi bagian dalam dan luar

dinding mempunyai ketinggian yang sama yaitu 2,5 m. Dinding tembok sisi barat daya bagian utara mempunyai bentuk dimana bagian bawah lebih tebal daripada bagian atas yaitu 2,35 m dan 1,95 m. Ketinggian dinding bagian dalam dan luar adalah 2,5 m. Dinding tembok sisi barat laut memiliki bentuk yang hampir serupa dengan dinding tembok barat daya bagian selatan. Tebal dinding bagian bawah adalah 1,6 m sedangkan bagian atas 1,15 m. Ketinggian dinding adalah 2,25 m. Berdasarkan gaya arsitekturnya, bangunan-bangunan di dalam Benteng Kuto Besak diidentifikasi bergaya Indis yang berkembang di Indonesia pada awal abad ke-20.

### **1. Mesjid Agung Palembang**

Letak Masjid Agung Palembang berada di sebelah timurlaut dari Benteng Kuto Besak dengan jarak  $\pm 150$  m. Bangunan yang didirikan tahun 1738 itu telah mengalami beberapa perubahan baik pada masa Kesultanan Palembang Darussalam hingga sekarang. Pada awalnya Masjid Agung Palembang tidak memiliki menara. Menara yang terletak di sebelah barat laut mesjid baru dibangun pada tahun 1758. Seperti masjid-masjid kuna pada umumnya, denah Masjid Agung Palembang berbentuk segiempat dengan ukuran 30 x 36 m dilengkapi mihrab yang berada di dinding barat. Atap masjid berbentuk tumpang, yang terdiri dari dua susun. Pintu masuk terdapat di dinding timur, utara, dan selatan masjid. Di dalam ruang utama masjid terdapat 4 tiang utama yang berbentuk segi delapan dengan ukuran 0,50 x 0,50 m setinggi 7 meter. Di keliling tiang utama terdapat 12 tiang penunjang. Sama seperti tiang utama, tiang penunjang berbentuk segi delapan dan berukuran 0,35 x 0,35 m setinggi 5 m.

Sebagian besar dari tiang-tiang tersebut pada bagian bawahnya telah diganti karena rusak. Pada tahun 1893, pemerintah Hindia Belanda melakukan penambahan teras yang dilengkapi dengan tiang - tiang bergaya *doric* dan pada

ketiga pintu masuk masjid dibentuk seperti gerbang yang beratap pelana yang ditunjang oleh tiang-tiang bergaya doric, tetapi kemudian tahun 1916 ketiga gerbang tersebut dibongkar kembali. Pada sekitar tahun 1938 atap teras yang mengelilingi bangunan utama dijadikan satu dengan atap masjid. Pada tahun 1952 di bagian teras masjid didirikan bangunan bertingkat dua sehingga menutupi bangunan utama masjid. Pada tahun tersebut dibangun pintu masuk utama di sisi timur yang berbentuk bangunan berdenah segiempat dengan atap berbentuk kubah. Tahun 1970 di sebelah timur laut masjid didirikan menara setinggi 45 m. Pada tahun 2000, bangunan di bagian teras masjid dibongkar dan digantikan dengan sebuah bangunan berlantai 3 yang diletakkan terpisah di sebelah timur masjid. Meskipun dibangun terpisah, bangunan baru tersebut tetap menutupi bangunan utama masjid.

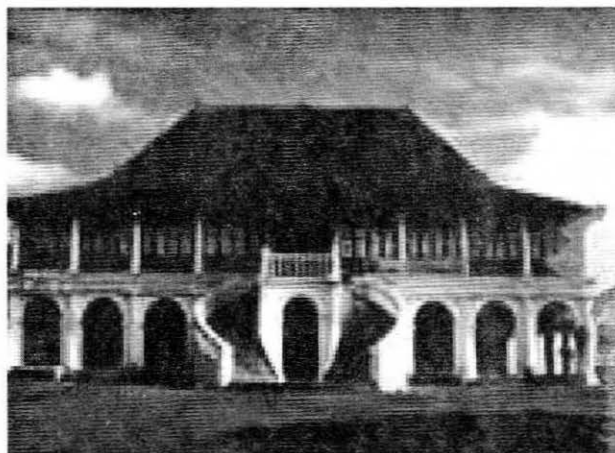


**Gambar 10.**  
**Masjid Agung Palembang (dok: penulis)**

### **3. Museum Sultan Mahmud Badaruddin II**

Museum Sultan Mahmud Badaruddin II pada awalnya merupakan rumah tinggal komisaris Hindia Belanda. Bangunan ini didirikan diatas reruntuhan Keraton Kuto Lamo, dibangun pada tahun 1823. Berbeda dengan bangunan yang didirikan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam yang

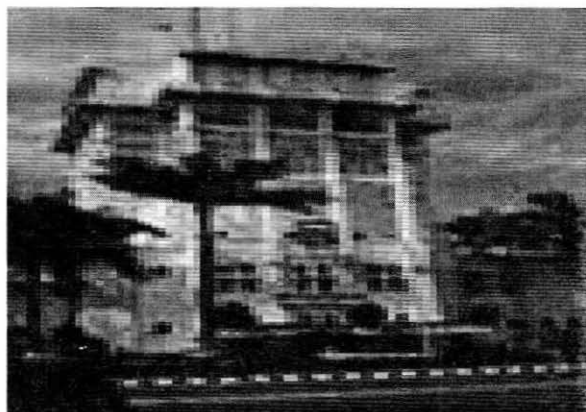
umumnya memakai bahan kayu, Museum Sultan Mahmud Badaruddin II memakai bahan bata dan memiliki gaya Indis.



**Gambar 11.**  
**Museum Sultan Mahmud Badaruddin II**  
**([www.balarpalembang.goid](http://www.balarpalembang.goid))**

#### **4. Kantor Walikota Palembang**

Bangunan Kantor Walikota Palembang sejak awal telah digunakan sebagai pusat pemerintahan *Gemeente* Palembang. Bangunan yang dibangun pada tahun 1929 ini didirikan dengan gaya *de stijl*, yaitu memiliki bentuk dasar kotak dengan atap datar. Selain sebagai kantor pemerintahan, dibagian atas bangunan didirikan menara setinggi 35 m yang difungsikan sebagai penampungan air bersih dengan kapasitas 1200 m<sup>3</sup>.



**Gambar 12.**  
**Kantor Walikota Palembang**  
**([www.balarpalembang.go.id](http://www.balarpalembang.go.id))**

## **5. Hotel Musi**

Bangunan yang sampai saat ini masih berfungsi sebagai penginapan merupakan hotel yang terbaik di Palembang pada tahun 1930-an. Pada awalnya hotel ini bernama Hotel Schwartz dan dibangun pada tahun 1923 dengan gaya Indis. Secara keseluruhan bangunan terdiri atas dua bangunan, yaitu bangunan utama dan bangunan penunjang. Pada bangunan utama terdapat dua bagian, yaitu ruang aula dan kamar tamu yang terdiri dari 20 kamar. Pada bangunan penunjang terdapat beberapa ruangan yang difungsikan sebagai gudang, dapur dan kamar mandi untuk kamar-kamar kelas ekonomi.



**Gambar 13.**  
**Hotel Musi**  
**([www.balarpalembang.goid](http://www.balarpalembang.goid))**

#### **A. Motif Kain Songket**

Motif songket yang memiliki beragam bentuk serta modelnya, tidak disangsikan merupakan bagian dari terciptanya perpaduan budaya dari beberapa kelompok masyarakat yang ada di Palembang. Sejarah songket itu sendirinya sejauh ini telah banyak diketahui, bahwa songket mulai dikenal sejak masa Kesultanan Palembang. Songket pada masa itu dipergunakan sebagai busana keluarga kerajaan Kesultanan Palembang.

Songket dipakai raja-raja sebagai pakaian kebesaran, yang berfungsi sebagai *keradong*, yang pemakaiannya dilakukan dengan cara diselempangkan di bahu dengan ujungnya menjuntai ke dada. Pemakaian selendang songket sebagai *keradong* sampai saat ini masih dipakai di Palembang, terutama pada tradisi masyarakat seperti upacara marhaban.

Songket memiliki filosofis serta makna yang terkandung didalam setiap motif yang ada padanya. Songket beserta motif yang ada didalam menunjukkan adanya gerak

perubahan serta perpaduan yang terlihat dari nama-nama motif songket Palembang, seperti misalnya motif *naga besaung* yang dipercaya memiliki keterkaitan dengan naga dalam mitologi kebudayaan Cina. Ciri utama dari songket Palembang adalah penggunaan warna merah dan emas terang sebagai motif utama. Akan tetapi secara umum songket memiliki nilai filosofis ketatanegaraan, politik serta budaya.<sup>100</sup>

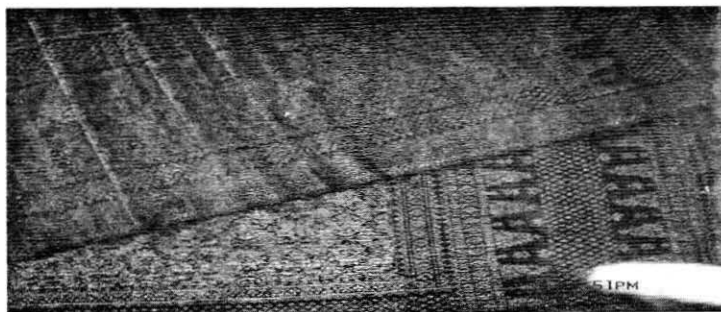
Secara garis besar motif songket terdiri atas kembang ditengah sebagai motif inti, kembang ini kemudian diikuti varian motif lain seperti *ombal*, *umpakbongkok* atau, , *tawur*, *pengapit*, *umpak ujung* dan *tretes*. Beberapa motif songket yang menunjukkan adanya akulturasi budaya masyarakat Palembang antara lain:

## 1. Nago Besaung

Motif inti songket ini adalah sebutan untu motif kembang tengah, gambar dekoratif berupa motif *nago besaung* menunjukkan betapa besar pengaruh Cina secara filosofis dalam budaya masyarakat Palembang. Dalam mitologi Cina, naga digambarkan sebagai ular bertanduk, bersisik keemasan serta memiliki kaki empat. Bentuk naga kemudian mengalami penghalusan yang disesuaikan dengan budaya masyarakat Palembang yang menganut agama Islam, sehingga gambar hewan harus disamarkan. Naga melambangkan penguasa, sedangkan bola emas sebagai simbolisasi dari kejayaan, kemakmuran.

---

<sup>100</sup> Yudhy Syarofie, *Songket Palembang, Nilai Filosofis, Jejak Sejarah, dan Tradisi*, Palembang: Pemda Sumatera Selatan, 2007.



**Gambar 14.**  
**Motif Nago Besaung**  
**([www.sonketpalembang.com](http://www.sonketpalembang.com))**

### **1. Bungo Cino**

Sesuai dengan namanya motif yang menonjol disini adalah warna emasnya. Sebab dalam budaya Cina warna merah dan emas lebih ditonjolkan. Motif bungo Cino ini memiliki variasi misalnya motif bungo Cino pulir lurus, yak ni berupa tabur-tabur kembang yang lerengnya lurus serta bungo Cino pulir bali, yakni pulir bunganya berpuncak-puncak seperti aksen patahan.



**Gambar 15.**  
**Motif Bungo Cino**  
**([www.sonketpalembang.com](http://www.sonketpalembang.com))**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Hubungan antara kelompok mayoritas (pribumi-Melayu) dan minoritas asing (keturunan Arab dan Cina) di Nusantara, menarik diperbincangkan mengingat relasi diantara masing masing kelompok ini mengalami pasang surut di sepanjang arus sejarah pembentukan peradaban masyarakat Indonesia modern. Jauh sebelum lahirnya wacana *multikulturalisme* pada hari ini, kehidupan majemuk bukanlah pengalaman baru bagi masyarakat Palembang. Sejarah panjang Palembang dari masa klasik-Sriwijaya sampai sekarang menunjukkan betapa nilai kemajemukan telah menjadi bagian yang terpisahkan dari entitas budaya masyarakatnya.

Dalam kontek ini, Palembang setidaknya tercatat sebagai salah satu tempat di Nusantara menunjukan adanya relasi yang kuat antara pribumi, orang Arab dan Cina dalam perspektif akulturasi budaya maupun relasi dalam bidang ekonomi maupun politik dari periode klasik sampai kini. Palembang selain menjadi tempat tinggal komunitas Melayu Palembang (lokal), juga menjadi tempat bagi bermukimnya etnik pendatang seperti keturunan Arab dan Cina. Kemajemukan kota Palembang telah terbentuk jauh sebelum Palembang menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Dimasa lampau Palembang menjadi bandar terpenting bagi perdagangan dan pelayaran Indonesia bagian barat yang menghubungkan dengan dua kawasan penting perdagangan Asia, yakni Cina, India dan Arab. Bahkan Palembang merupakan salah satu bandar terpenting bagi terbentuknya komunitas yang berciri kosmopolitan, yakni pada periode

kerajaan maritim Sriwijaya maupun pada masa Kesultanan Islam Palembang Darussalam.

Palembang yang kita lihat sekarang merupakan perpaduan mozaik yang menarik, karena selama beratus-ratus tahun, wilayah mengalami pergantian kekuasaan serta pengaruh sosial maupun budaya yang melekat pada kultur masyarakatnya. Hal yang terlihat jelas seperti pada model arsitektur bangunan kolonial serta motif kain songket Palembang sebaga contoh menarik dari terjadinya akulturasi budaya.

Pelajaran yang bisa diambil dari hasil penelitian diatas adalah permasalahan relasi antara suku bangsa yang berbeda beserta komponen didalamnya justru akan menambah khazanah budaya serta menjadi pengikat erat bagi ingatan bersama diantara sebagai sebuah bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ari, Kemas, *Masyarakat Tionghoa Palembang, Tinjauan Sejarah Sosial (1823-1945)*, Palembang: Forum Pengkajian Sosial Budaya, 2003.
- Abdullah, Makmun dkk, *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, Jakarta: Depdikbud, Proyek IDSN, 1984/1985.
- Coppel, Charles, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994.
- Bigalke, Terry, "The Oral History Methode", dalam *Sejarah Lisan*, Jakarta: Lembaran Berita Arnas, No.9 Oktober, 1982.
- Djoned Poesponegoro, Marwati, *Sejarah Nasional Indonesia II*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terjemahaan Noegroho Notoesanto, Jakarta: UI Press, 1986.
- Hanafiah, Johan, *Melayu-Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Handoko, T. Hani, "Tradisi (Manajemen) Dagang ala Tionghoa", dalam *Penguasa Ekonomi dan Sukses Pengusaha Tionghoa*, Yogyakarta: Lembaga Studi Realino, 1996.
- Iskandar. T, *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka, 1986.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jakarta: Gramedia, 1993.

- Koentjaraningrat, "Metode Penggunaan Data Pengalaman Individu" dalam Koentjaraningrat (ed), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Lohanda, Mona, *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001.
- Lembaga Studi Realino, *Penguasa Ekonomi dan Sukses Pengusaha Tionghoa*, Yogyakarta: Lembaga Studi Realino, 1996.
- Purwati, Retno, *Sejarah Perkembangan Pemukiman Masyarakat Cina di Palembang*, Palembang: Jurnal Arkeologi Balar Palembang, 2002.
- Salim Peter dan Yani Salim, *Kamus Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1995.
- Sevenhoven, J.L, *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, terjemahaan Sugarda Purbakawartja, Jakarta: Bharata, 1971.
- Soeryadinata, Leo, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Grafitti Press, 1984.
- , *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986.
- , *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Nasional*, Jakarta: LP3ES, 1999.
- Stibbe, D.G, *Encyclopaediavan Nederlandsch-Indie*, Leiden: 'sGravenhage Jilid III, 1919.
- Sulaiman, Satyawati, *He Archealogy and History of West Sumatra*, Jakarta: Bulletin Penelitian Arkenas, 1997.
- Taim, Eko Asih Putriana, *Pemukiman Tepi Sungai di Kota Palembang*, Palembang: Jurnal Arkeologi Balar Palembang, 2002.

- Twan Djie, Twiem, *Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa, Suatu Studi Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Wardoyo, T.S, *Tan Jin Sing dari Kapiten Cina sampai Bupati Yogyakarta*; Jakarta Gramedia, 1981.
- Wibowo, I, *Harga yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001.
- , *Retrospeksi dan Rekontekstualisasi, Masalah Cina*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999.
- Wolters, O.W, *The Fall of Sriwijaya in Malay History*, Singapura: Oxford University Press, 1970.
- Vasanty, Puspa, "Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia", dalam Koentjaraningrat (ed), *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1980.
- Zed, Mestika, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003.
- , "The Dualistic Economy of Palembang in Late Colonial Period, Thomas J. Linblad (ed), *Historical Foundation of National Economy in Indonesia, 1890s-1990s*, North-Hollands Akademie van Wetenschappen Verhandeling, Afd Letterkunde, Nieuwe, dell 167, 1996.

## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Hambali Hasan  
Umur : 63 Tahun  
Pendidikan : Sarjana  
Pekerjaan : Pengurus BMA Sumsel  
Alamat : Palembang
2. Nama : Djohan Hanafiah  
Umur : 65 Tahun  
Pendidikan : Sarjana  
Pekerjaan : Sejarawan,  
Alamat : Palembang
3. Nama : H.A Zawawie Said  
Umur : 70 Tahun  
Pendidikan : Sarjana  
Pekerjaan : Ketua LVRI Kota Palembang  
Alamat : Palembang
4. Nama : Salim bin Abu Bakar Assegaf  
Umur : 70 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Bedahara LVRI Kota Palembang  
Alamat : Palembang

5. Nama : Tjoa Kok Lim (Kohar)  
Umur : 70 Tahun  
Pendidikan : HIS  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Palembang

**BPSNT Padang  
Press**



(Anggota IKAPI Sumbar)  
Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji  
Padang Sumatera Barat  
Telp/Fax: 0751-496181  
Website: [www.bpsnt-padang.info](http://www.bpsnt-padang.info)

**Perpustakaan  
Jenderal**

9

IS

978-602-8742-20-7

